

**KEPENTINGAN SUDAN SELATAN PASCA REFERENDUM
DISINTEGRASI DI TAHUN 2011**

(Skripsi)

Oleh

Geraldo Marcellino



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2019**

ABSTRAK

KEPENTINGAN SUDAN SELATAN PASCA REFERENDUM DISINTEGRASI DI TAHUN 2011

Oleh

Geraldo Marcellino

Sudan dan Sudan Selatan pada awalnya merupakan satu negara. Akibat tingginya intensitas konflik di antara kedua negara tersebut, maka pada akhirnya Sudan Selatan memilih untuk melakukan disintegrasi. Akan tetapi, meskipun Sudan Selatan berhasil memisahkan diri, mereka tetap menghadapi berbagai permasalahan sebagai negara baru. Berbagai konflik dan juga krisis di bidang ekonomi, militer, dan juga politik masih tetap terjadi dan juga kekurangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya menjadikan Sudan Selatan khawatir akan kestabilan dan juga kedaulatan negaranya. Oleh karena itu, untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada maka Sudan Selatan membuat kerjasama dengan Negara-negara lain dengan cara memanfaatkan sumber daya minyak bumi yang menjadi pemasukan tertinggi mereka. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan dengan mengacu pada konsep kepentingan nasional, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sudan Selatan mendapatkan keuntungan berdasarkan faktor ekonomi, faktor keamanan, dan juga faktor politik. Hal ini didasari pada indikator yang dikemukakan oleh Donald. E. Nuechterlein.

Kata kunci : Kepentingan Nasional, Sudan Selatan, Disintegrasi, *Comprehensive Peace Agreement*

ABSTRACT

The Interest of South Sudan After Disintegrating Referendum in 2011

By

Geraldo Marcellino

Sudan and South Sudan were originally one country. Due to the high intensity of conflict between the two countries, South Sudan finally chose to disintegrate. However, even though South Sudan managed to separate themselves, they still faced various problems as a new nation. Conflicts as well as crises in the economic, military and political sectors still occur and the shortcomings to meet the needs of the people make South Sudan worry about the stability and sovereignty of the country. Therefore, to cover up the shortcomings that existed, South Sudan made cooperation with other countries by utilizing petroleum resources which became their highest income. By using qualitative research methods and by referring to the concept of national interest, the results of this study indicate that South Sudan benefits from economic, security and political factors. this is based on the indicators put forward by Donald. E. Nuechterlein.

Keywords: National Interest, South Sudan, Disintegration, Comprehensive Peace Agreement

**KEPENTINGAN SUDAN SELATAN PASCA REFERENDUM
DISINTEGRASI DI TAHUN 2011**

Oleh
GERALDO MARCELLINO

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **KEPENTINGAN SUDAN SELATAN PASCA REFERENDUM DISINTEGRASI DI TAHUN 2011**

Nama Mahasiswa : **Geraldo Marcellino**

No. Pokok Mahasiswa : **1516071080**

Jurusan : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Wahyu Handayani *Indra Jaya Wiranata*

Dwi Wahyu Handayani, S.IP., M.Si. **Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A.**
NIP 19780328 200812 2 002 NIK 231704921219101

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

Dr. Ari Darmastuti

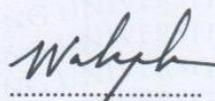
Dr. Ari Darmastuti, M.A.
NIP 19600416 198603 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

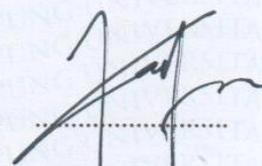
Ketua

: **Dwi Wahyu Handayani, S.IP., M.Si.**



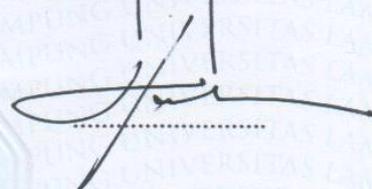
Sekretaris

: **Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A.**



Penguji

Bukan Pembimbing: **Hasbi Sidik, S.IP., M.A.**



2. **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Dr. Syarief Makhya

NIP 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian : **16 Agustus 2019**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon: (0721) 704626 email: pshi@fisip.unila.ac.id. Laman: <http://hi.fisip.unila.ac.id/>

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 16 Agustus 2019
Yang membuat pernyataan,


Geraldo Marcelino
NPM 1516071080

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Bandar Lampung pada 19 Juli 1997 sebagai anak pertama dari pasangan bahagia Bapak Hafriza Burhan dan Ibu Esther.

Penulis mulai menempuh pendidikan di TK Katika Jaya II-6 Bandar Lampung pada tahun 2002-2003, dilanjutkan ke SD Kartika Jaya II-5 Bandar Lampung pada tahun 2003-2009, dilanjutkan ke SMPN 4 Bandar Lampung pada tahun 2009-2012, dilanjutkan ke SMA Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 2012-2015. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dengan terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2015

Selama masa perkuliahan, penulis pernah mengikuti organisasi Perwakilan Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional (PHMJ HI) di tahun 2017-2018.

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh rasa syukur kupersembahkan karya sederhana ini untuk
Bapak Hafriza Burhan dan Ibu Esther, Yang selalu mendukung dan banyak berkorban
dalam segala hal,
Kakak dan juga adik-adikku Andrew Carlos Alamanzo, Michael Alvaro Valentino,
dan Serena Karen
serta Almamater tercinta Universitas Lampung, tempat dan media mengenal dunia

MOTTO

Apabila kamu dihormati dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. (Q.S. An-Nisa: 86)

Mengenal diri sendiri jauh lebih sukar daripada ingin mengetahui pribadi orang lain, sebab itu, kenalilah dirimu sendiri sebelum mengenai orang lain.

(Buya Hamka)

Not everything you see is true, so that's why sometimes you have to see with your heart, not just your eyes

(Geraldo Marcellino, 2019)

SANWACANA

Alhamdulillahil'alamin, puji syukur atas keridhoan Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Kepentingan Sudan Selatan Pasca Referendum Disintegrasi di Tahun 2011" ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik bagi umatnya.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagai bentuk adanya keterbatasan kemampuan serta sebagai motivasi untuk lebih baik dan terus belajar kedepannya. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembacanya dan sebagai perkembangan penelitian dalam kajian ilmu sosial dan ilmu politik khususnya pada ilmu hubungan internasional.

Pada kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Syarief Makhya, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Ibu Dwi Wahyuni H, S.IP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama yang sangat bijaksana, pengertian dan selalu memberikan keceriaan kepada penulis selama masa perkuliahan dan juga bimbingan.
4. Bapak Indra Jaya Wiranata, S.IP.,M.A, selaku Dosen Pembimbing Kedua yang banyak meluangkan waktu dan sangat sabar dalam membimbing dan memberikan motivasi pada penulis.
5. Bapak Dr. Dedi Hermawan, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembahas / Penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang sangat berguna bagi skripsi ini.
6. Bapak Hasbi Sidik, S.IP, M.A yang bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi pengganti bapak Dedi sebagai pembahas skripsi saya selagi beliau menjalankan ibadah haji
7. Seluruh jajaran Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Lampung, Pak Aman, Mas Gara, Mas Tyo, Mas Nizar, Mba Tiwi, Mba Atta, Mba Pipit, Mba Gita Dj, Mba Tety, Mas Fredrik, Mba Nisa, Mba Ayu, Mas Robi. Terimakasih atas ilmu, bantuan dan keceriaan baik di dalam maupun luar perkuliahan.
8. Senior Brader & Sister Bang Banu, Bang Chandra, Bang Reza, Bang Ridho, Kak Citra, Kak Deya, Kak Arum, Kak Yuni, Kak Eka, Kak Nisrina, Puspa, DKK.

9. Brader I wayan Sulpai & Fitrah Jaya yang selalu menjadi andalan penulis dalam menjalani proses ini, memberikan hiburan dan menjadi tempat penulis berbagi keluh kesah. Semoga skripsi ini menjadi salah satu hal yang membanggakan kalian.
10. Imel, Anin, Christine, Hani, Eno, Aay, Fijar, Abel, Jodi, Ica, Jawak, Bil, Mela, Dara, Tria, Ale, Wita, Ayam, Firly, Hana, Linda, Nia, Bela, Ica, Anggi, Galih, Ulul, Ayu, Agoy, Farhan, Maul, Titus, Wahid, Pio, Malebi, Hanu, Rona, Bila, Bela, Nindi, Agung, Iren, Eja, Anggun, Gio, dll.
11. Sahabat-sahabat Saya, Puput, Koko, dan Kiki yang selalu menjadi target bullyan saya dari dulu hingga sekarang.
12. Rekan-rekan dari CONNECT yang menjadi penyemangat saya.
13. Keluarga Besar Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Lampung.
14. Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dan dedikasi yang telah diberikan oleh semua pihak yang membantu dalam proses yang dijalani oleh penulis.

Bandar Lampung, 16 Agustus 2019

Penulis,

Geraldo Marcellino

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| DAFTAR ISI | i |
| DAFTAR TABEL | iii |
| DAFTAR GAMBAR | iv |
| DAFTAR SINGKATAN | v |
| | |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 5 |
| 1.4. Manfaat Penelitian | 5 |
| | |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | 7 |
| 2.1. Penelitian Terdahulu | 7 |
| 2.2. Kerangka Konseptual | 15 |
| 2.2. Konsep Kepentingan Nasional | 15 |
| 2.3. Teori Negara | 18 |
| 2.4. Teori Disintegrasi | 22 |
| 2.5. Kerangka Pemikiran | 24 |
| | |
| III. METODE PENELITIAN | 28 |
| 3.1. Jenis Penelitian | 28 |
| 3.2. Fokus Penelitian | 29 |
| 3.3. Jenis dan Sumber Data | 29 |
| 3.4. Teknik Pengumpulan Data | 30 |
| 3.5. Teknik Analisa Data | 30 |

| | |
|---|------------|
| IV. GAMBARAN UMUM..... | 32 |
| 4.1 Gambaran Umum Sudan | 32 |
| 4.1.1 Konstitusi Sudan | 36 |
| 4.1.2 Konflik Antara Sudan dan Sudan Selatan | 37 |
| 4.2 Lahirnya Sudan Selatan | 45 |
| 4.3 Negara Yang Memiliki Pengaruh Terhadap Disintegrasi Sudan dan Sudan Selatan | 49 |
| 4.3.1 Mesir | 49 |
| 4.3.2 Uganda | 52 |
| 4.3.3 Tiongkok | 57 |
| 4.3.4 Amerika Serikat | 61 |
| V. HASIL DAN PEMBAHASAN | 65 |
| 5.1 Kepentingan di Bidang Ekomomi | 66 |
| 5.1.1 Kerjasama minyak bumi dengan Tiongkok..... | 66 |
| 5.1.2 Bantuan luar negeri dari Amerika Serikat..... | 70 |
| 5.1.3 Bantuan air bersih dari Mesir | 72 |
| 5.2. Kepentingan di Bidang Keamanan | 74 |
| 5.2.1 Bantuan militer dari Tiongkok..... | 74 |
| 5.2.2 Kerjasama militer Dengan Amerika Serikat..... | 78 |
| 5.2.3 Bantuan pencari suaka Uganda..... | 81 |
| 5.3. Kepentingan di Bidang Politik | 83 |
| 5.3.1 Bantuan persiapan kemerdekaan dari Tiongkok..... | 83 |
| 5.3.2 Bantuan penyusunan system politik dari Amerika Serikat | 89 |
| 5.3.3 Pengakuan pertama dari Mesir | 93 |
| 5.3.4 Menjaga hubungan politik dengan Uganda..... | 95 |
| VI. PENUTUP | 98 |
| 6.1 Kesimpulan | 98 |
| DAFTAR PUSTAKA | 100 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|----------------|
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu..... | 14 |
| Tabel 4.1 Kepemilikan Saham di Sudan dan Sudan Selatan..... | 35 |
| Tabel 4.2 Profil Negara Sudan..... | 37 |
| Tabel 4.3 Perjanjian Sudan dan Sudan Selatan..... | 45 |
| Tabel 4.4 Profil Negara Sudan Selatan..... | 48 |
| Tabel 5.1 Hasil Penelitian..... | 97 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|---|----------------|
| Gambar 1.1 Kondisi Sudan Selatan..... | 04 |
| Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran..... | 27 |
| Gambar 4.1 Peta Sudan dan Sudan Selatan..... | 33 |
| Gambar 5.1 Tentara Perdamaian China di Sudan..... | 77 |

DAFTAR SINGKATAN

| | | |
|--------|---|---|
| BRI | : | <i>Belt and Road Initiative</i> |
| CNPC | : | China National Petroleum Company |
| CPA | : | <i>Comprehensive Peace Agreement</i> |
| DPA | : | <i>Darfur Peace Agreement</i> |
| EAC | : | <i>East African Community</i> |
| GNPO | : | Greater Nile Petroleum Operating Company |
| IGAD | : | <i>Intergovernmental Authority on Development</i> |
| JEM | : | <i>Justice and Equality Movement</i> |
| NCP | : | <i>National Congress Party</i> |
| NUP | : | <i>National Unionist Party</i> |
| SDA | : | Sumber Daya Alam |
| SPLM/A | : | <i>Sudan's People Liberation Movement/Army</i> |
| UPDF | : | <i>Uganda People's Defence Force</i> |
| USAID | : | <i>United States Agency for International Development</i> |
| WNPOC | : | White Nile Petroleum Operating Company |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sudan Selatan merupakan sebuah negara yang terletak di Benua Afrika. Sudan Selatan mendapatkan kemerdekaan di tahun 2011 dan memiliki sejarah konflik yang cukup panjang sejak masa kemerdekaan saat masih menjadi satu dengan Sudan, dan sebelum melakukan referendum disintegrasi. Seperti Negara Afrika lainnya, konflik di Sudan telah menjadi perhatian dunia internasional karena berbagai faktor. Negara ini berbatasan langsung dengan negara Mesir di sebelah utara, Negara Chad disebelah barat dan selatan, serta Negara Ethiopia disebelah timur (Prio Paper, 2010:6).

Konflik yang terjadi antara Sudan dan Sudan Selatan bermula dari tindakan ketidakadilan pemerintah terhadap masyarakat yang berada di wilayah selatan atas dasar tindakan rasisme. Pada awalnya, Sudan Selatan merupakan bagian dari kenegaraan Sudan sejak merdeka dari Inggris pada tahun 1956. Saat itu, Sudan masih belum terlepas dari konflik. Konflik yang terjadi pertama kali di Sudan pasca kemerdekaan merupakan perang saudara antara suku Anyanya yang berada di wilayah selatan Sudan yang bermayoritaskan penduduk yang menganut agama

Kristen dan Animisme yang melawan pihak pemerintah Sudan yang mayoritasnya muslim. Perang ini terus berlanjut hingga ditandatanganinya perjanjian Addis Albaba di tahun 1972 yang menghasilkan pembentukan daerah otonomi khusus di bagian selatan dibawah pemerintahan Sudan (BBC, akses 15 Juli 2019).

Pasca perjanjian Addis Albaba, di tahun 1983 Presiden Ja'afar Nimeiri kembali memicu terjadinya sebuah konflik dengan cara menerapkan politik islamisasi di wilayah selatan Sudan. Dalam proses Islamisasi tersebut, dilaporkan adanya tindakan kekerasan dan tindak diskriminasi pada suku-suku yang menetap di wilayah selatan. Hal tersebut didasari oleh tindakan pemerintah yang secara paksa ingin menjadikan Sudan sebagai negara islam yang berdaulat. Hal tersebut tentu ditentang oleh penduduk yang berada di wilayah selatan yang mayoritasnya merupakan non-muslim sehingga konflik pun kembali memanas (Peace Insight, akses 16 Juli 2019).

Konflik kembali terjadi di tahun 2003 dimana penduduk di bagian selatan membentuk gerakan pemberontakan untuk menuntut adanya keadilan di bidang ekonomi dan politik. Untuk merespon pihak pemberontak, pemerintah membentuk pasukan untuk menghadapi mereka sehingga perang saudara pun kembali terjadi dan tidak dapat dihindari. Sampai saat ini Sudan masih mengalami krisis keamanan yang disebabkan oleh perang saudara yang terjadi antara sudan wilayah utara dan sudan wilayah selatan. Perang tersebut terjadi karena adanya konflik kepentingan politik yang menyeret dua kubu yang kuat di Sudan hingga pada tahun 2011 Negara Sudan pun terbagi menjadi dua kubu, Selatan dan Utara (Putri, 2017:84).

Untuk menghentikan konflik antara kelompok pemberontak dan Janjaweed, Presiden Chad, Idriss Déby menjadi mediator antara kedua pihak dalam perundingan gencatan senjata 45 hari pada 2003, namun perundingan ini tidak berhasil. Uni Afrika atas permintaan SPLM/A menjadi mediator dalam perundingan kembali tahun 2004 untuk membahas gencatan senjata dan masuknya bantuan kemanusiaan ke Darfur. Kedua pihak juga menandatangani *Darfur Peace Agreement* pada 2006, namun hanya SPLM/A yang dipimpin oleh Minni Minnawi yang menandatangani perjanjian tersebut. SPLM/A yang dipimpin oleh Abdul Wahid tidak mau menandatangani Darfur Peace Agreement karena pembagian kekuasaan dan kompensasi yang dijanjikan tidak sesuai yang mereka minta (Global Security, akses 17 Juli 2019).

Konflik yang sudah berlangsung sejak lama tetap berlangsung hingga setelah Sudan Selatan merdeka dari Sudan, konflik masih terus berlanjut di antara kedua negara. *Sudan People's Liberation Army* (SPLA) menyebrang ke Sudan dan militer Sudan mengebom desa-desa di perbatasan. Bahkan, konflik antara Sudan dan Sudan Selatan mengarah ke perang antara kedua negara.

Permasalahan yang terjadi antara Sudan Selatan dan Sudan sempat terhenti karena adanya *Comprehensive Peace Agreement* (CPA) yang berlangsung selama 6 tahun dari tahun 2005-2011 (Isnan, 2014:740). dalam periode itu, terjadi gencatan senjata hingga akhirnya Sudan Selatan melakukan referendum untuk melakukan disintegrasi pada 9 Januari 2011 dan berakhir pada kemerdekaan Sudan Selatan pada tanggal 9 Juli 2011 dengan jumlah 98,83% penduduk Sudan Selatan memilih untuk memisahkan diri dari pemerintah Sudan (Chandra, 2014:1).

Gambar 1.1 Kondisi Sudan Selatan



(Gambar diambil dari: kuwaittimes.net)

Meskipun telah merdeka, berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Sudan Selatan sebagai Negara baru hadir dari faktor eksternal maupun internal. Dari eksternal, Sudan Selatan masih harus menjaga wilayahnya dari ancaman yang berasal dari Sudan dan berbagai ancaman lain yang dapat datang dari berbagai pihak. Sedangkan dari faktor internalnya sendiri, Sudan Selatan masih harus menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakatnya. Oleh karena itu, sebagai negara baru,

1.2 Rumusan Masalah

Sudan merupakan negara yang diketahui telah mengalami konflik sejak lama dengan wilayah dari Sudan itu sendiri di bagian selatan. Berbagai konflik seperti konflik etnis, konflik agama, dan perebutan wilayah hingga terjadinya perang saudara dan banyaknya pelanggaran hukum humaniter internasional yang terjadi dalam

konflik antara kedua belah pihak. Setelah terjadinya beragam perseteruan yang terjadi, pada akhirnya Sudan wilayah selatan mengambil keputusan untuk melakukan referendum. Diketahui pula ada intervensi dari pihak asing dalam proses referendum tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti paparkan di atas, maka peneliti merumuskan suatu pertanyaan penelitian yaitu, “*apa kepentingan Sudan Selatan pasca referendum disintegrasi di tahun 2011?*”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini disusun untuk menjadi arahan analisis lebih lanjut guna menjawab pertanyaan penelitian di atas. Adapun tujuan penelitian ini yaitu;

1. Mendeskripsikan Sudan Selatan pasca referendum disintegrasi 2011
2. Menganalisis kepentingan Sudan Selatan pasca referendum disintegrasi 2011

2.4 Manfaat Penelitian

kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis: meningkatkan pemahaman tentang Sudan Selatan pasca referendum disintegrasi 2011

2. Secara praktis: dapat dijadikan bahan informasi mengenai dinamika disintegrasi suatu negara dan juga tentang kepentingan nasional.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Sudan dan Sudan Selatan memiliki sejarah konflik yang sangat panjang dan masih berlangsung hingga saat ini. Konflik yang terjadi pun sedikit demi sedikit berujung pada perang saudara yang telah menimbulkan pelanggaran hukum kemanusiaan dan juga banyaknya korban jiwa. Konflik yang terjadi akibat perebutan wilayah yang memiliki cadangan minyak yang luas akhirnya membuat wilayah Sudan Selatan melakukan referendum sebagai bentuk perlawanan kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan hak dan keadilan mereka. Berikut ini adalah penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan konflik yang terjadi antara Sudan dan Sudan Selatan yang dapat dijadikan sebagai acuan dan penentu alur penelitian ini.

Penelitian pertama merupakan sebuah Skripsi berjudul “Konflik di Darfur, Sudan” yang ditulis oleh Kartika Pemilia Lestari yang merupakan mahasiswa Universitas Airlangga Tahun 2006. Pada skripsi ini menjelaskan tentang latar belakang terjadinya

konflik di wilayah Darfur yang kemudian mengacu pada penelitian saya tentang “Analisis Penyebab Disintegrasi Sudan dan Sudan Selatan di tahun 2011”. Peneliti menggunakan Teori Konflik Domestik dan Teori Pertumbuhan Ekonomi. Di penelitiannya, Kartika menggunakan metode penelitian eksplanasi dengan menggunakan dua variable atau lebih sehingga membentuk satu kesatuan rumusan masalah yang utuh. Dalam skripsinya ini, peneliti menjelaskan bahwa secara garis besar latar belakang permasalahan adalah pada Februari 2003 di Darfur. Darfur merupakan sebuah wilayah yang dimana sedang terjadi bencana kemanusiaan yang dipicu oleh konflik etnis yang melibatkan kegiatan penyerangan terhadap fasilitas-fasilitas pemerintah oleh pasukan pemberontak yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Sudan People’s Liberation Movement/Army (SPLM/A) dan Justice and Equality Movement (JEM).

Menurut hasil penelitian, gerakan tersebut karena pemerintahan pusat telah menekan etnis kulit hitam Afrika yang berada di wilayah selatan demi keuntungan Etnis Arab yang berada di utara. Isu agama dan isu etnis pun menjadi faktor dari konflik tersebut dan juga adanya faktor internal dan eksternal yang memegang peranan penting sebagai pemicu konflik di Darfur. Ketegangan yang terjadi pun semakin berlanjut dengan intensitas yang semakin meningkat sehingga perseteruan antara pasukan militer pemerintah dan pasukan pemberontak (SPLM/A dan JEM) tidak dapat dihindari.

Penelitian kedua merupakan sebuah jurnal berjudul “Internasionalisasi Konflik Etnis Darfur Tahun 2003-2013” yang ditulis oleh Dikara Maitri Pradipta Alkarisya

alumni Universitas Airlangga. Dalam jurnal ini peneliti menggunakan teori Konflik Etnis, Internasionalisasi, dan Intervensi. Penelitian ini dapat membantu penelitian peneliti tentang awal mula terjadinya Disintegrasi Sudan. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa; pasca kemerdekaan Sudan, Sudan masih berada dalam kondisi yang belum stabil. Hal ini dikarenakan konflik etnis yang tak kunjung selesai, bahkan Sudan tidak dapat menjaga keutuhan wilayahnya. Hal ini terlihat dari keinginan rakyat Sudan Selatan untuk memisahkan diri menjadi suatu negara baru. Meski Sudan Selatan telah menjadi negara baru, ketegangan konflik internal Sudan sendiri belum berakhir. Perselisihan etnis Fur terjadi dengan etnis Arab yang memiliki kebiasaan hidup *nomaden*, atau suka berpindah-pindah tempat tinggal. Kebiasaan hidup berpindah-pindah ini merupakan kebiasaan bagi sejumlah kecil etnis Arab.

Kelompok Arab Darfur terkenal sebagai kelompok yang miskin dan tidak memiliki daratan tetap untuk tinggal. Awal mula konflik etnis Darfur dimulai sejak kehadiran bangsa Arab di Darfur. Bangsa Arab memilih Darfur karena wilayah ini dianggap subur dan memiliki air bersih. Akhirnya bangsa Arab yang selalu hidup berpindah-pindah, memutuskan untuk menetap di Darfur. Pertanian yang subur di Darfur memang menarik kaum nomaden untuk tinggal. Akan tetapi, kehadiran mereka menghasilkan gesekan antar etnis, terutama bagi masyarakat yang bermata pencaharian petani. Gesekan sosial tersebut membuat Darfur mengalami penurunan dalam bidang pertanian dan kestabilan ekologi yang terganggu. Hal ini pun berdampak pada pembangunan di seluruh wilayah dan membuat kemiskinan bagi seluruh masyarakat Darfur.

Penelitian ketiga merupakan sebuah jurnal internasional berjudul “ The Cause and Consequence of Conflict in South Sudan” karya Aziza Geleta Dessalegn. Penelitian beliau menggunakan konsep Power Struggle dan juga teori Ethnicity. Penelitian ini dapat membantu peneliti dalam mengumpulkan informasi dan data-data tentang dampak dari konflik antar etnis yang didasari oleh perebutan wilayah. Penelitian ini menjelaskan bahwa konflik yang berada di Sudan semakin memanas pasca diresmikannya referendum Sudan Selatan. Penyebab konflik agama dan etnis yang terjadi terbilang cukup kompleks, akan tetapi pada awalnya didasari oleh perebutan wilayah. Pelanggaran hukum humaniter pun banyak terjadi karena dampak dari konflik yang sedang berlangsung.

Menurut peneliti, pelaku utama dari konflik yang hingga menyebabkan Sudan Selatan referendum adalah Presiden Salva Kiir dan mantan wakilnya Rick Machar. Awal konflik tersebut terjadi karena Presiden Salva Kiir menuduh mantan wakilnya akan melakukan pemberontakan/kudeta karena ingin menguasai wilayah dan perekonomian Sudan yang memiliki cadangan minyak yang melimpah. Karena tidak terima akan hal itu, maka mantan wakil presiden Rick Machar akhirnya melakukan pengasingan diri demi keselamatan dirinya sendiri sehingga pada akhirnya terdapat dua kubu di Sudan, wilayah utara dan selatan.

Militer utama Sudan dikuasai oleh wilayah utara sehingga Sudan bagian utara melakukan penyerangan terlebih dahulu. Untuk menghindari kekalahan, pihak selatan pun pada akhirnya membentuk pasukan SPLM/A dan juga JEM. Faktor utama pasca referendum dari penyebab konflik kedua wilayah ini adalah perebutan wilayah yang

memiliki cadangan minyak melimpah yang berada ditengah-tengah kedua negara tersebut, yaitu wilayah Abyei. Selain konflik wilayah tersebut, permasalahan di Sudan telah terjadi sejak awal merdeka. Hal tersebut dikarenakan etnis Arab lebih mendominasi wilayah utara yang subur dibandingkan etnis Afrika yang menetap di wilayah Selatan yang kurang cocok untuk ditanami perkebunan.

Penelitian keempat berasal dari skripsi yang berjudul "Kebijakan Amerika Serikat Dalam Mendukung Kemerdekaan Sudan Selatan tahun 2011" yang ditulis oleh Shofia Nida, seorang mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam skripsi tersebut peneliti menjelaskan kalau Amerika Serikat memiliki peranan penting dalam proses referendum Sudan Selatan karena memiliki kepentingan tertentu. Dalam skripsinya, peneliti menggunakan Teori Kebijakan Luar Negeri dan Konsep Kepentingan Nasional. Penelitian ini dapat membantu peneliti dalam mengetahui tentang intervensi pihak asing dalam konflik Sudan dan juga adanya campur tangan dari pihak Amerika Serikat dalam proses referendum Sudan Selatan. Dari hasil penelitian ini, diketahui kalau Amerika tidak hanya memberikan bantuan diplomatik, akan tetapi juga bantuan ekonomi serta bantuan militer dengan budget tinggi dan juga dilanjutkan dengan mendirikan camp militer untuk melatih militan Sudan Selatan. Faktor lain dari Amerika Serikat memberikan bantuan kepada Sudan Selatan adalah karena adanya kepentingan atas sumber daya minyak karena Sudan merupakan sebuah negara yang dikenal memiliki cadangan minyak yang melimpah.

Dengan adanya niatan Sudan Selatan memisahkan diri maka itu menjadi kesempatan emas bagi Amerika Serikat untuk melakukan kerjasama untuk melakukan

kerjasama nantinya. Faktor lain yang mendorong Amerika Serikat untuk melakukan kerjasama dengan Sudan Selatan adalah karena adanya hubungan dengan Tiongkok yang merupakan partner bisnis Sudan Selatan dan menjadikan kesempatan Amerika Serikat untuk menyeimbangkan kekuatan Tiongkok di Sudan. Dukungan yang diberikan Amerika Serikat mencapai puncaknya pada masa Presiden Bush saat ditandatanganinya CPA (Comprehensive Peace Agreement) oleh kedua Sudan untuk membuat solusi dari perseteruan kedua Sudan selama ini lewat jalan referendum. Kebijakan-kebijakan yang dibuat Amerika Serikat untuk mendukung kemerdekaan di Sudan Selatan akhirnya membuahkan hasil dengan dilakukannya referendum pada Januari 2011 dan mendapatkan kemerdekaannya pada Juli 2011.

Penelitian kelima berdasarkan buku “Sudan: From Conflict to Conflict” karya Marina Ottaway dan Mai El-Sadany. Buku ini membantu peneliti dalam mencari tahu tentang konflik-konflik yang terjadi di wilayah Sudan dan Sudan Selatan. Peneliti menggunakan teori *Civil War*, *Realism*, dan *Ethnic Conflict*. Dalam buku ini dijelaskan bahwa perebutan lahan cadangan minyak merupakan faktor utama penyebab konflik hingga perang saudara di Sudan.

Setelah terpisahnya Sudan Selatan, wilayah yang mengandung sekitar 75% cadangan minyak yang berada di tengah-tengah perbatasan antara Sudan dan Sudan Selatan menjadi tak bertuan. Wilayah tersebut sempat akan melakukan referendum juga, akan tetapi tidak ada pihak yang bersedia mengakui wilayah tersebut. Berbagai usaha telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik yang berada di antara kedua wilayah tersebut, akan tetapi tidak ada yang berhasil sehingga pada akhirnya Sudan

wilayah selatan melakukan pemisahan atau referendum. Konflik Sudan merupakan konflik yang sulit untuk diidentifikasi karena adanya banyak faktor selain agama dan etnis, perebutan wilayah juga merupakan faktor utama konflik. Menurut buku ini, ada empat konflik utama yang terjadi antara Sudan dan Sudan Selatan dan akan peneliti bahas di penelitian ini.

Keunikan dari penelitian ini yang berjudul: “Kepentingan Sudan Selatan Pasca Referendum Disintegrasi di Tahun 2011” yaitu peneliti akan meneliti tentang apa yang menjadi faktor penyebab Sudan Selatan melakukan referendum dan apakah ada tindakan dari pihak luar mengenai konflik yang terjadi. Dengan menggunakan penelitian-penelitian terdahulu yang akan peneliti jadikan acuan, peneliti berharap dapat mendapatkan kelancaran dalam menjalankan penelitian ini dan mendapat hasil yang peneliti inginkan dengan menggunakan teori kepentingan nasional, negara, dan disintegrasi.

| | Literature 1 | Literature 2 | Literature 3 | Literature 4 | Literature 5 | Penelitian Ini |
|-------------------------|--|---|--|--|---|--|
| Judul | Konflik di Darfur, Sudan | Internasionalisasi Konflik Etnis Darfur Tahun 2003-2013 | The Cause and Consequence of Conflict in South Sudan | Kebijakan Amerika Serikat Dalam Mendukung Kemerdekaan Sudan Selatan Tahun 2011 | Sudan: From Conflict to Conflict | Kepentingan Sudan Selatan Pasca Referendum Disintegrasi di Tahun 2011 |
| Penulis | Kartika Pemilia Sari | Dikara Maitri Pradipta | Aziza Geleta Dessalegn | Shofia Nida | Marina Ottaway dan Mai El-sadani | Geraldo Marcellino |
| Teori/Konsep | Konflik Domestik dan Teori Pertumbuhan Ekonomi | Konflik Etnis, Internasionalisasi, Intervensi | Power Struggle, dan Ethnicity | Teori Kebijakan Luar Negeri, dan Konsep Kepentingan Nasional | Civil War, Realism, Ethnic Conflict | Kepentingan Nasional, Negara, Disintegrasi |
| Pendekatan | Kualitatif | Kualitatif | Kualitatif | Kualitatif | Kuantitatif | Kualitatif |
| Argumen Utama | Penyebab awal konflik di wilayah ini adalah karena adanya perseteruan etnis Arab dan etnis Afrika dalam memperebutkan hak dan keadilan Etnis Afrika. | Dampak dari konflik Darfur yang telah menarik perhatian dunia karena banyaknya korban luka dan korban jiwa serta terjadinya pelanggaran hukum humaniter | Adanya pengaruh dari suatu agama dan etnis yang memicu konflik perebutan wilayah yang terjadi di Sudan Selatan dan dampaknya bagi negara sekitar. | Amerika Serikat merupakan negara adikuasa yang mengandalkan minyak sebagai komponen utama perekonomian, oleh karena itu Sudan merupakan partner bisnis yang bagus. | Konflik di Sudan telah terjadi sejak pasca kemerdekaan, berbagai jenis konflik etnis, agama, serta perebutan wilayah kerap terjadi hingga pada akhirnya terjadil referendum Sudan Selatan | Pasca melakukan referendum, Sudan Selatan menerima bantuan dari negara-negara lain dengan harapan untuk menutupi kekurangan sebagai negara baru |
| Fokus Penelitian | Di penelitian ini, peneliti mencari tahu tentang permasalahan dan dampak dari konflik yang berada di Darfur, Sudan | Peneliti mencari tahu dampak dan respon pihak luar mengenai konflik yang terjadi di Darfur | Peneliti mencari tahu akar masalah yang terjadi di Sudan Selatan dan menemukan kalau konflik perebutan wilayah di Sudan diawali oleh konflik agama dan Etnis | Peneliti meneliti tentang usaha Amerika Serikat dalam mendukung gerakan referendum Sudan Selatan melalui berbagai kebijakan | Peneliti meneliti beragam jenis konflik yang terjadi di wilayah Sudan dan Sudan selatan pasca kemerdekaan. | Peneliti ingin meneliti tentang keuntungan apa yang didapat oleh Sudan Selatan dengan kerjasamanya dengan Tiongkok, Amerika, Mesir, dan juga Uganda. |

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu

2.2. Kerangka Konseptual

Penelitian ini akan menggunakan Teori dan Konsep yang berkaitan dengan Kepentingan Sudan Selatan Pasca Referendum Disintegrasi di Tahun 2011, yaitu konsep disintegrasi, konsep negara, dan teori kepentingan nasional.

2.2.1 Kepentingan Nasional

Interaksi merupakan inti dari Hubungan Internasional. Dibalik suatu interaksi tentu ada kepentingan yang menyebabkan atau menjadi alasan interaksi tersebut. Negara sebagai aktor utama dalam Hubungan Internasional, juga memiliki kepentingan yang menjadi alasan mereka dalam melaksanakan hubungan internasional dengan negara lain. Esensi dari interaksi ada tiga, yaitu, actors (pelaku), Interest (kepentingan), power (kekuasaan). Dalam melakukan interaksi, tiap negara pasti memiliki kepentingan masing-masing dalam skala internasional demi negara itu sendiri, hal tersebut dinamakan kepentingan nasional.

Kepentingan nasional merupakan sebuah konsep dalam analisis hubungan internasional yang cukup sering digunakan baik untuk mendeskripsikan, menjelaskan, ataupun meramalkan perilaku negara-negara dalam tingkat internasional dan juga dapat menjelaskan suatu tujuan dan ambisi negara, baik dari segi ekonomi, militer, ataupun budaya. Menurut Machiavelli, kepentingan nasional banyak dirujuk dalam praktik maupun pengembangan teoretis, sebagai pembenaran bagi perilaku internasional negara yang mengabaikan kepentingan utama pada masa purba

sebelumnya, yaitu agama dan moralitas. Kepentingan nasional yang sering dianggap sebagai bahan pokok kebijakan luar negeri harus secara jelas diuraikan dan dipahami oleh suatu negara yang mengejar hal tersebut.

Menurut Donald E. Nuechterlein, konsep kepentingan nasional telah digunakan oleh para ahli sejak ditemukannya konsep *Nation-State* untuk menjelaskan aspirasi dan juga tujuan dari negara-negara berdaulat di arena internasional. Konsep kepentingan nasional memiliki 4 kepentingan dasar, yaitu:

- kepentingan pertahanan, perlindungan suatu negara dan juga penduduknya dari ancaman kekerasan fisik yang dilancarkan langsung dari negara lain atau ancaman luar yang mengancam sistem pemerintahan dan juga kedaulatan suatu negara itu sendiri.
- kepentingan ekonomi, peningkatan ekonomi suatu negara merupakan keharusan untuk meningkatkan kekuatan negara tersebut. Untuk alasan itu negara bekerja sama dengan negara lain untuk meningkatkan hubungan kerjasama ekonomi agar menjadi lebih baik.
- kepentingan tatanan dunia, pemeliharaan sistem politik internasional dan juga sistem ekonomi yang kuat dan stabil menjadi alasan bagi suatu negara dan seluruh jajaran penduduknya untuk merasa aman tanpa perlu memikirkan berbagai permasalahan dan konflik yang akan terjadi diluar batas negaranya.
- kepentingan ideologi, kemajuan dan juga perlindungan terhadap nilai-nilai suatu bangsa yang juga berhubungan dengan kepercayaan di masing-masing negara

merupakan poin penting untuk mempertahankan kedaulatan suatu negara itu sendiri.

Menurut Hans J. Morgenthau, kepentingan nasional (*national interest*) merupakan pilar utama bagi teorinya tentang politik luar negeri dan politik internasional yang realis. Pendekatan Morgenthau ini begitu terkenal hingga telah menjadi suatu paradigma dominan dalam studi politik internasional sesudah Perang Dunia II. Pemikiran Morgenthau didasarkan pada kepentingan nasional, bukan ada alasan-alasan moral, legal dan ideologi yang dianggapnya utopis dan bahkan berbahaya. Ia menyatakan kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan maupun kerja sama. Demikianlah, Morgenthau membangun konsep abstrak dan yang artinya tidak mudah didefinisikan, yaitu kekuasaan (*power*) dan kepentingan (*interest*), yang dianggapnya sebagai sarana dan sekaligus tujuan dan tindakan politik internasional (Massaguni, 2017).

Menurut Felix E. Oppenheim, ia mengartikan konsep kepentingan nasional sebagai tujuan kesejahteraan pemerintahan nasional dalam level internasional. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kepentingan nasional dari suatu negara bertujuan untuk menjaga otonomi politik dan integrasi nasional demi kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan sampai ke tahap internasional. Secara garis besar kepentingan nasional adalah tujuan, cita-cita dan harapan yang ingin dicapai oleh suatu negara (UNAIR, 2016).

Konsep kepentingan nasional digunakan oleh peneliti sebagai acuan penelitian tentang bagaimana sikap dan tindakan pihak asing yang membantu pihak Sudan Selatan dalam melakukan referendum. Diketahui dalam proses referendum Sudan Selatan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dalam berbagai bidang baik dari segi militer, keamanan nasional, ekonomi, maupun politik. Oleh karena itu, peneliti menggunakan konsep kepentingan nasional sebagai acuan penelitian.

2.2.2 Negara

Para ahli memberikan definisi tentang negara dengan penjelasan yang beragam, hal tersebut dikarenakan pandangan dan konsep mereka yang berbeda, dan juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi pemikiran mereka.

Menurut Karl Marx dan Engels, negara merupakan sebuah alat kepentingan kelas sosial dominan dan perspektif strukturalis menganggap negara sebagai lembaga yang memiliki otonomi relatif. Menurut Thomas Hobbes, negara terbentuk karena adanya kekuasaan tunggal dari setiap individu. Jika semua individu mempersatukan kekuasaan tersebut, maka kekuasaan tunggal ini akan menjadi otoritas politik yang efektif untuk menciptakan keamanan dan perdamaian dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu, Hobbes juga menambahkan kalau otoritas politik harus berdasarkan persetujuan rakyat dan menolak kekuasaan secara turun-menurun (Eric Hiarief 2003:261).

Locke memiliki definisi yang hampir serupa dengan Hobbes, dimana ia memahami proses pembentukan suatu negara dalam kerangka perlindungan hak

alamiah setiap individu untuk menjamin legitimasi pemerintahan untuk menjamin keamanan dan ketertiban yang menjamin kehidupan yang aman dan sejahtera. Akan tetapi, Locke menolak gagasan Hobbes mengenai kekuasaan tunggal karena apabila setiap anggota masyarakat tidak memiliki rasa saling percaya, maka kekuatan politik di suatu negara tersebut tidak akan berjalan. Menurut Locke, fungsi negara ada 3, yaitu; 1) fungsi legislasi, 2) fungsi eksekutif, 3) fungsi federative. Teori dari John Locke kemudian disempurnakan oleh Montesquieu,

Selain itu, menurut Konvensi Montevideo syarat terbentuknya suatu negara adalah:

- Adanya populasi tetap yang permanen

Populasi yang dimaksud merupakan sebuah perkumpulan masyarakat yang menetap di suatu wilayah dalam jumlah tertentu.

- Batas wilayah yang jelas

Adanya jarak-jarak yang jelas pada setiap perbatasan untuk menunjukkan daerah yang menjadi hak dan kekuasaan suatu negara.

- Adanya sistem pemerintahan

Sistem pemerintahan dibutuhkan agar dapat mengatur kehidupan masyarakat. Tanpa adanya sebuah sistem pemerintahan, maka suatu negara tak akan bisa berdiri

- Adanya kemampuan untuk menjalin relasi dengan negara lain

Suatu negara tak akan dapat bertahan untuk waktu yang lama tanpa adanya bantuan dari negara lain.

- Keberadaan politik yang jelas

Keberadaan politik yang merupakan poros utama suatu sistem telah menjadi syarat wajib bagi suatu negara agar dapat mempertahankan keberadaannya.

- Memiliki peraturan UU yang mencakup hak masyarakat

Peraturan perundang-undangan menjadi acuan suatu negara untuk memberikan peraturan pada masyarakat. Dengan undang-undang, maka peraturan dapat dibuat menyesuaikan keadaan suatu negara tersebut.

- Tidak adanya intervensi dari negara lain dalam menyelesaikan permasalahan internal

Untuk menunjukkan kemampuan suatu negara, maka dalam menyelesaikan permasalahan terutama masalah internal maka suatu negara akan berusaha menyelesaikan permasalahan tanpa adanya campur tangan dari pihak luar.

Untuk menentukan apakah suatu negara berdaulat atau tidak dapat dilihat dari beberapa indikator seperti berikut:

- Hukum yang terlampir dengan jelas

Dalam hal ini hukum yang dimaksud merupakan sebuah hukum baik tertulis seperti undang-undang dan hukum tidak tertulis seperti hukum adat yang diakui oleh masyarakat negara itu sendiri.

- Pemerintahan yang tertata

Setiap wilayah di suatu negara yang berdaulat diwajibkan memiliki struktur pemerintahan yang diakui secara sah dan legal secara politik agar distribusi kekuasaan dapat disebarluaskan secara adil

- Dalam status merdeka

Negara yang berdaulat merupakan suatu negara yang memiliki kemerdekaan dan tidak berada dibawah tekanan atau kekuasaan negara atau pihak lain.

- Memiliki “power”

Sebuah negara yang berdaulat memiliki kekuatan di berbagai bidang, seperti militer, ekonomi, politik, dll dan memiliki pengaruh terhadap negara lain.

- Memiliki wilayah tetap

Negara-negara yang berdaulat memiliki sebuah wilayah yang diakui secara sah dan memiliki batasan-batasan negara dengan negara lain.

- Memiliki otoritas yang jelas

Otoritas suatu pemimpin di negara yang berdaulat tidak ada campur tangan dari pihak lain dan dapat dilihat dari kualitas pemimpin yang sedang menjabat

- Memiliki hubungan yang baik dengan negara lain

Adanya relasi dengan negara lain merupakan bukti suatu negara memiliki kedaulatan dan hubungan dengan negara lain dibutuhkan untuk mempertahankan negara tersebut.

- Memiliki hak atas kebijakan dan UU sendiri

Undang-undang yang dibuat berdasarkan atas kehendak untuk mengatur dan meningkatkan kualitas masyarakat negara itu sendiri dan tidak menguntungkan pihak luar.

- Tidak berada dibawah kendali pihak lain

Negara yang berdaulat merupakan negara yang memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai hal atau permasalahan dengan sendirinya dan tidak bergantung pada pihak luar (Eric Hiarief 2003;261).

2.2.3 Disintegrasi

Disintegrasi adalah suatu keadaan tidak bersatu padu atau keadaan terpecah belah; hilangnya keutuhan atau persatuan; perpecahan. Disintegrasi secara harfiah difahami sebagai perpecahan suatu bangsa menjadi bagian-bagian yang saling terpisah. Secara umum penyebab disintegrasi bangsa adalah karena rasa tidak puas dan rasa ketidakadilan oleh masyarakat terhadap pemerintah yang mengakibatkan pemborantakan atau separatisme (Webster's New Encyclopedic Dictionary 1994).

Disintegrasi merupakan sebuah isu dalam kajian Hubungan Internasional yang memiliki dampak yang sangat buruk bagi suatu negara karena dapat menimbulkan pecahnya negara itu sendiri. Disintegrasi itu sendiri merupakan suatu keadaan dimana terjadinya suatu perpecahan yang terjadi karena hilangnya rasa nasionalisme dan kesadaran akan pentingnya persatuan. Disintegrasi biasanya disebabkan oleh suatu permasalahan yang pada akhirnya berujung pada konflik yang tidak dapat dihindari dan sulit untuk dihentikan. Ada pun beberapa gejala timbulnya disintegrasi, antara lain;

- Tidak adanya persamaan pandangan (perspektif) antara anggota masyarakat mengenai tujuan yang semula dijadikan patokan oleh masing-masing anggota masyarakat.
- Perilaku para warga masyarakat cenderung melawan/melanggar nilai-nilai dan norma-norma yang telah disepakati bersama.
- Kerap kali terjadi pertentangan antara norma-norma yang ada di dalam masyarakat.
- Nilai-nilai dan norma-norma yang ada di masyarakat tidak lagi difungsikan dengan baik dan maksimal sebagaimana mestinya.
- Tidak adanya konsistensi dan komitmen bersama terhadap pelaksanaan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma yang ada di masyarakat.
- Kerap kali terjadinya proses-proses sosial di masyarakat yang bersifat disosiatif, seperti persaingan tidak sehat, saling fitnah, saling hasut, pertentangan antarindividu maupun kelompok, perang urat syaraf, dan seterusnya.

Disintegrasi merupakan sebuah faktor terpenting yang dilancarkan imperialisme untuk mendominasi pemerintahan suatu negara sehingga pembangunan masyarakatnya diorientasikan pada corak Barat. Masyarakat Barat dibangun di atas dasar disintegrasi dan diskriminasi yang menjadi tumpuan rasionalitas Eropa, logika pembaratan, dan pola kehidupan Barat. Hal-hal tersebut tidak berarti di hadapan masyarakat tradisional yang masih orisinal sebagai rival negara disintegrasi dan aspek-aspek yang bertumpu pada disintegrasi dan diskriminasi. Disintegrasi tidak akan berhasil tanpa adanya faktor-faktor pendukung. Faktor utama dalam terjadinya disintegrasi adalah kurangnya pengetahuan dan pandangan masyarakat terhadap politik dan perdamaian dan kurang adanya rasa nasionalisme yang tinggi, kurangnya rasa toleransi sesama bangsa, campur tangan pihak asing dalam masalah bangsa.

Menurut Baiq Wardhani, faktor internal yang menyebabkan disintegrasi bangsa adalah militer, ekstraksi sumber daya alam, serta perbedaan etnik dan agama, sedangkan faktor eksternalnya adalah adanya campur tangan pihak asing dalam suatu konflik yang sedang berlangsung dalam suatu negara. Militer kerap digunakan sebagai alat pertahanan bangsa, akan tetapi dengan adanya kekuatan militer untuk menyelesaikan konflik dapat memberikan stigma pada masyarakat bahwa militer menyebabkan penyelewengan Hak Asasi Manusia.

Disintegrasi juga dapat disebabkan oleh ketidakadilan dalam pembagian hasil alam antara pemerintah dan penduduk lokal. Pemerintah kerap melakukan kerja sama dengan perusahaan multinasional dalam bidang sumber daya alam. Efek dari keadaan tersebut adalah penduduk lokal tidak dapat memanajemen hasilnya sendiri dan

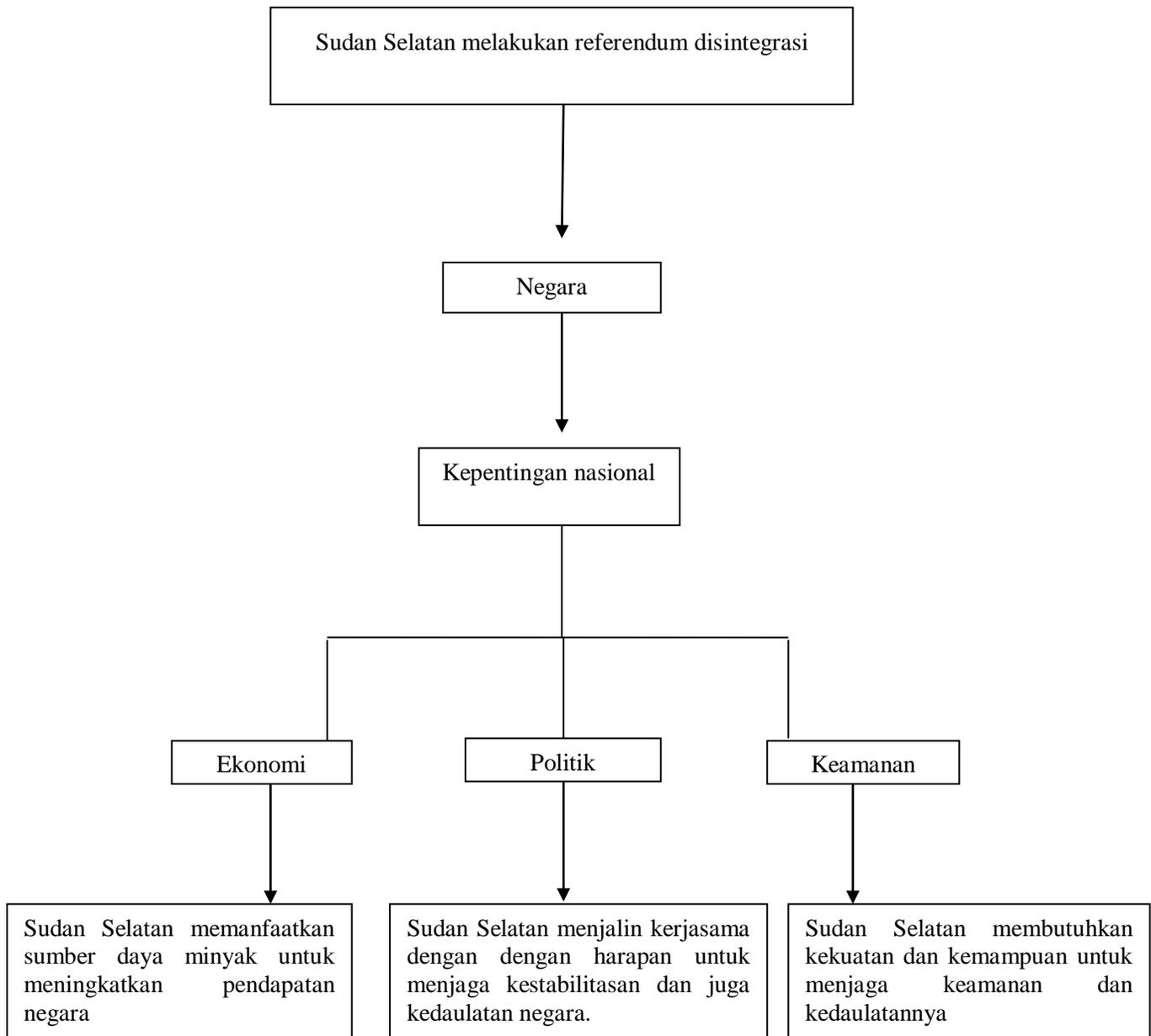
cenderung mendapatkan hasil yang tidak memuaskan. Hal ini mengakibatkan terjadinya konflik dan perlawanan dari masyarakat. Faktor internal lainnya adalah tidak adanya toleransi dalam perbedaan etnik dan agama yang dapat memicu konflik hingga terjadinya perang saudara.

peneliti menggunakan konsep disintegrasi karena konsep ini dapat membantu peneliti dalam mengkaji proses terjadinya disintegrasi Sudan Selatan terhadap Sudan di tahun 2011. Selain itu, sesuai dengan poin pertama; tidak adanya persamaan perspektif antar anggota masyarakat dan poin kedua; perilaku masyarakat cenderung melawan norma dapat membantu peneliti memudahkan dalam proses penelitian dan juga dapat menjadi acuan dalam penelitian yang sedang dijalankan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Sudan Selatan selaku negara baru dikenal sebagai negara yang terus berseteru. diketahui adanya konflik antar agama dan etnis hingga perebutan wilayah dan juga timbulnya perang saudara sejak pasca kemerdekaannya. Awal mula konflik diketahui karena adanya protes dari etnis Afrika kepada Etnis Arab karena wilayah utara yang dikenal subur ditempati hampir secara keseluruhan oleh mayoritas etnis Arab. Di sisi lain, kedua etnis yang tinggal di kedua wilayah konflik itu pun memiliki agama yang berbeda pula. Di wilayah utara didiami oleh mayoritas etnis Arab yang beragama Islam, sedangkan di wilayah selatan didiami oleh mayoritas etnis Afrika yang beragama Kristen dan penganut Animisme.

Dari persetujuan hingga perang saudara yang terjadi, diketahui sumber permasalahan utama kedua kubu tersebut adalah sumber cadangan minyak yang melimpah sehingga selain dapat menjadi sumber keuntungan yang besar, hal tersebut pun dapat menarik perhatian negara-negara adikuasa seperti Amerika Serikat dan Tiongkok untuk melakukan investasi pada siapapun yang mendapatkan negara tersebut. Selain itu, negara yang berbatasan dengan Sudan dan juga Sudan Selatan yaitu Mesir dan juga Uganda melakukan intervensi dalam proses referendum Sudan Selatan. Kedua negara tersebut diketahui memiliki kedekatan secara historis dengan Sudan Selatan bahkan sejak sebelum merdekanya Sudan dan masih dalam status negara terjajah.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut John W. Creswell, penelitian kualitatif merupakan sebuah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan pertanyaan dan prosedur yang muncul, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan peneliti kemudian memberikan interpretasi mengenai makna dari data yang diperoleh. Laporan akhir penelitian kualitatif memiliki struktur kerangka yang fleksibel. Siapa pun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bersifat induktif (Bakry, 2016:14-15).

Penelitian ini membahas suatu kasus khusus yang menurut Yves-Chantal Gagnon merupakan suatu penelitian untuk mengamati dan menganalisis fenomena tunggal dengan menggunakan pendekatan yang holistik, dan tidak hanya mendapatkan hasil yang deskriptif dari sebuah fenomena yang diamati, namun juga pemahaman mendalam mengenai aktor-aktor yang terlibat di dalamnya (*Gagnon*, 2010:1).

Berdasarkan definisi tersebut peneliti akan melakukan pemahaman terhadap keadaan disintegrasi Sudan dan Sudan Selatan setelah terlaksananya referendum Sudan Selatan dan apa saja dampak dan pihak mana saja yang memiliki pengaruh dalam proses disintegrasi Sudan dan Sudan Selatan tersebut.

3.2 Fokus Penelitian

Peneliti akan memfokuskan penelitian ini pada :

1. Kepentingan Sudan Selatan melakukan referendum sehingga terjadinya disintegrasi.
2. Kepentingan-kepentingan yang didapat oleh Sudan Selatan dari negara lain pasca melakukan referendum.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah

ada, peneliti yang menggunakan data sekunder merupakan tangan kedua. Data sekunder dapat diperoleh melalui sumber-sumber data berupa jurnal, buku, laporan tertulis, berita-berita internasional, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti, yaitu telaah Pustaka (*Library Research*). Menurut Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik (Moleong, 2012:157).

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber tertulis yang dibagi atas sumber buku yang telah peneliti kumpulkan, jurnal dari situs resmi dan terpercaya seperti, laporan tertulis, sumber dari arsip maupun dokumen resmi, yang memiliki keterkaitan dengan disintegrasi Sudan dan Sudan Selatan. Peneliti memperoleh data-data dari SIPRI, Security.org, military.org, UN official website, dll melalui akses internet.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik analisis data kualitatif melalui proses studi kasus. Di mana penulis akan mengumpulkan data lalu menganalisis dan menjelaskan tentang kepentingan nasional Sudan Selatan pasca

referendum berdasarkan data yang diperoleh kemudian dikaitkan dengan teori/konsep yang digunakan. Agar peneliti dapat menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis (Bakry, 2016:229).

Setelah data yang diperlukan terkumpul, peneliti melakukan reduksi data. Kemudian data yang telah direduksi tersebut dianalisis menggunakan acuan terhadap teori/konsep yang digunakan. Sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan yang akan menjawab pertanyaan penelitian.

BAB IV

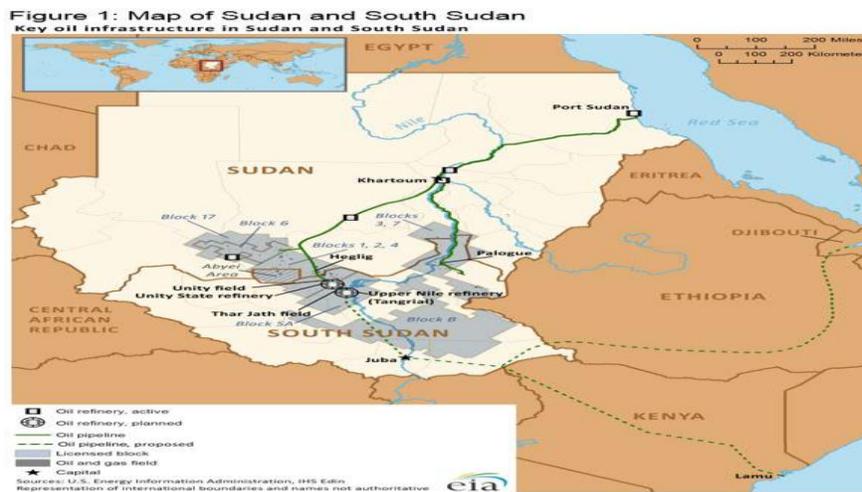
GAMBARAN UMUM

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan sejarah singkat antara Sudan dan Sudan Selatan. Dalam bab ini peneliti juga akan menjelaskan adanya hubungan dalam proses disintegrasi Sudan Selatan terhadap Sudan yang diketahui adanya intervensi dari pihak asing.

4.1 Sudan

Benua Afrika telah dikenal sebagai wilayah penuh konflik, salah satu negara yang berada di benua tersebut adalah Sudan. Nama Sudan diambil dari bahasa Arab yaitu "*Bilad as Sudan*" yang berarti "*Land of Black*". Sudan merupakan Negara yang terletak di bagian timur laut afrika diantara 4 dan 23° LU serta 22 dan 38 BT. Luas wilayah Sudan sekitar 1 juta mil persegi yang berbatasan dengan Afrika Tengah dan Chad dibagian Barat, Libya dan Mesir dibagian Utara, Ethiopia dan Eritrea dibagian Timur, serta Kenya, Uganda dan Kongo dibagian Selatan. Sudan sebelumnya dikenal sebagai negara yang sangat miskin dengan struktur sosial yang terbelakang karena merupakan salah satu negara bekas jajahan, namun kemudian terbantu seiring dengan produksi dan ekspor minyak yang dilakukan sejak tahun 1999, pertumbuhan ekonomi

Sudan menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Tercatat pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi mencapai 8% dan meningkat pada tahun 2006 menjadi 9,6%. Pada saat itu dunia menilai kalau Sudan dapat dibidang sebagai salah satu negara yang tercepat pertumbuhannya di Afrika Hal tersebut dapat dimungkinkan terjadi karena Sudan memiliki kemampuan untuk mulai dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi para investor dan mampu menarik investasi asing masuk ke Sudan di sektor strategis dan *profitable* seperti perminyakan. Sudan menganut system perekonomian bebas dan terbuka dengan menitikberatkan pada peran sektor swasta dalam kegiatan ekonomi dan proses pembangunan. Program pembangunan ekonomi dilaksanakan untuk periode tiga tahunan dengan mengacu pada arahan International Monetary Funds (IMF) (World Bank 2007).



Gambar 4.1 diambil dari: **Country Analysis Brief: Sudan and South Sudan.pdf**

Ekspor Sudan ke negara lain masih didominasi oleh minyak bumi *Petroleum* dan *Petroleum products*. Diindikasikan ekspor komoditi ini di tahun mendatang akan terus meningkat. Jika pada tahun 2002 produksinya baru mencapai 250 ribu Barel per

hari (bph) dan pada tahun 2004 menjadi 340 ribu bph, kemudian di tahun 2006 telah mendekati angka 500 ribu bph, dan akan terus ditingkatkan sampai pada posisi 800 ribu bph jika beberapa blok yang sedang dieksploitasi sudah dapat berproduksi secara penuh. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang terus berlangsung sebagian besar ditangani oleh konsorsium *Greater Nile Petroleum Operating Company/GNPO* (Sudan's Tribune, 2015). Daftar kepemilikan saham minyak bumi yang terdapat di wilayah Abyei dapat dilihat di table yang dilampirkan peneliti. Selain minyak, sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian Sudan. Sekitar 40 persen dari pendapatan nasional berasal dari sektor pertanian. Beberapa produk pertanian terpenting untuk ekspor (*cash crop*) antara lain : kapas, *sesame* (wijen), sorghum, kacang tanah, biji bunga matahari (*sun flower seed*), dan getah Arab (*gum Arabic*) dimana Sudan merupakan pengeksport terbesar dunia saat ini. Sudan juga memiliki sejumlah hasil tambang, antara lain emas, chrome, gypsum dan nikel, namun baru tambang emas yang mulai digali secara komersial (Country Analysis Brief: Sudan and South Sudan 2018:4).

Tabel 4.1 Kepemilikan Saham di Sudan dan Sudan Selatan

| Consortium | Company | Country of Origin | Share |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------|
| Greater Nile Petroleum Operating Company (GNPOC) | CNPC | Tiongkok | 40% |
| | Petronas | Malaysia | 30% |
| | ONGC | India | 25% |
| | Sudapet | Sudan | 5% |
| Greater Pioneer Operating Company (GPOC) | CNPC | Tiongkok | 40% |
| | Petronas | Malaysia | 30% |
| | ONGC | India | 25% |
| | Nilepet | South Sudan | 5% |
| Dar Petroleum Operating Company (DPOC) | CNPC | Tiongkok | 41% |
| | Petronas | Malaysia | 40% |
| | Nilepet | South Sudan | 8% |
| | Sinopec | Tiongkok | 6% |
| | Tri-ocean Energy | Egypt | 5% |
| | CNPC | Tiongkok | 41% |
| Sudd Petroleum Operating Company (SPOC) | Petronas | Malaysia | 67.9% |
| | ONGC | India | 24.1% |
| | Nilepet | South Sudan | 8.0% |
| | CNPC | Tiongkok | 95% |
| Petro Energy Operating Company (PEOC) | CNPC | Tiongkok | 95% |
| | Sudapet | Sudan | 5% |
| Petrolines for Crude Oil Ltd. (Petco) | Petco | Sudan | 50% |
| | Sudapet | Sudan | 50% |

Tabel Diolah dari: Company websites, IHS Edin, IHS Markit, BMI Research

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat kalau perusahaan-perusahaan yang berasal dari Tiongkok mendominasi lahan minyak di Sudan Selatan. Sektor industri minyak di Sudan Selatan masih belum mengalami perkembangan, hal itu karena banyaknya konflik yang terjadi dan juga terbelakangnya pendidikan sehingga kebutuhan untuk kedua negara baik Sudan dan Sudan Selatan masih bergantung pada impor. Selain itu faktor penghambat lainnya adalah kurangnya modal dan lemahnya tenaga listrik. Hingga kini, Sudan masih mengalami krisis dan kelangkaan tenaga listrik nasional. Meskipun sejumlah proyek PLTA baru telah disetujui, namun pelaksanaannya masih tertunda dan hal tersebut berpengaruh pada aktifitas sehari-hari

dalam kehidupan masyarakat. Satu-satunya industri yang mengalami perkembangan pesat adalah industri gula karena dukungan permodalan dari sejumlah negara Teluk dan perluasan ekspor, sehingga memungkinkan Sudan menjadi pengeksport gula terpenting di Timur Tengah dan kawasan Afrika Timur. Faktor lain yang menjadi penghambat pembangunan adalah adanya gangguan keamanan nasional yang memaksa negara mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk meningkatkan pertahanan dan juga keamanan hingga mengurangi anggaran belanja untuk meningkatkan kualitas SDM.

4.1.1 konstitusi Sudan

Konstitusi pertama Sudan dibuat tanggal 12 April 1973, atau dalam era pemerintahan Presiden Ja'far Nimeiri. Namun pada April 1985 dibekukan oleh Jenderal Abdurrachman Suar El Dahab (Menteri Pertahanan) yang mengkuadeta Presiden Nimeiri. Konstitusi baru terbentuk setelah Bridgen Omer Ahmad Al Bashir tampil sebagai presiden. Sebelum konstitusi lama dibubarkan, Dewan Komando Revolusi Penyelamat Rakyat (*Al Inqaz Al Wathan*) menyusun Konstitusi baru yang berdasarkan Syariah Islam sebagai sumber hukum dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Tanggal 30 Juni 1998 Presiden Al Bashir memberlakukan Konstitusi baru setelah mendapatkan dukungan rakyat melalui referendum pada bulan Mei 1998 (CP. Sudan 2008, Op.Cit) Menurut Bab I pasal 2 Konstitusi baru 1998 menyebutkan bahwa, Republik Sudan adalah negara Federal dan menganut sistem pemerintahan Presidensial. Adapun sumber hukumnya adalah Hukum Islam (Syariah), Konstitusi dan *consensus* nasional. Dalam menjalankan pemerintahan Presiden dibantu oleh 2 orang wakil presiden, menteri-menteri, menteri negara dan penasehat presiden

setingkat menteri yang seluruhnya bertanggung jawab kepada Presiden.14 Bab IV pasal 108 mengatur tentang pembagian Sudan menjadi 26 negara bagian/ propinsi yang dikepalai Wali (Gubernur). Pembagian wilayah tersebut dimaksudkan untuk memeransertakan seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan dan mempertahankan persatuan dan kesatuan Sudan.

Tabel 4.2 Profil Negara Sudan 2019

| | | |
|---|---------------------|------------------------------------|
| 1 | Nama Resmi | The Republic of the Sudan |
| 2 | Kepala Negara | Umar Hasan Ahmad al-Bashir |
| | Wakil Kepala Negara | Ali Osman Taha |
| 3 | Ibukota | Khartoum |
| 4 | Luas Wilayah | 1.886.068 km ² |
| 5 | Bahasa | - Arab (bahasa resmi) - Inggris |
| 6 | Mata Uang | Pounds Sudan |

Tabel Diolah Dari: (CIA.gov, 2018)

4.1.2 Konflik Antara Sudan dan Sudan Selatan

Perjuangan rakyat Sudan untuk mengusir penjajah yang semakin meningkat mendorong Inggris dan Mesir membuat perjanjian tentang kemerdekaan Sudan dan penyelenggaraan Pemilu untuk memilih partai politik sebagai embrio negara Sudan. Januari 1954 dilaksanakan Pemilu dan dimenangkan oleh *National Unionist Party* (NUP) pimpinan Ismail Al Azhari yang selanjutnya menjadi Presiden Pertama Sudan 1 Januari 1956 Negara Sudan beberapa kali dijajah oleh Mesir dan Inggris hingga pada akhirnya Sudan mendeklarasikan kemerdekaanya pada tanggal 1 Januari 1956

dari Inggris. Sudan dikenal sebagai negara penghasil minyak yang cukup besar di Benua Afrika, dan juga merupakan salah satu negara terbesar di Afrika yang mempunyai keberagaman suku, ras, dan agama. Ada dua etnis terbesar di Sudan, yaitu Etnis Arab dan Etnis Afrika. Sudan dan Sudan Selatan pada awalnya merupakan satu negara. (World Bank 2019) Meski begitu, kedua etnis besar tersebut selalu berseteru hingga menimbulkan konflik dengan korban jiwa. Berbagai perbedaan antara kedua wilayah yang terdapat di Sudan akhirnya menjadi salah satu faktor terpecahnya negara tersebut. Sudan pada awalnya merupakan sebuah negara bekas jajahan kolonial Inggris untuk rentan waktu yang cukup lama, hingga pada akhirnya di tahun 1956 Sudan memperoleh kemerdekaan. Meskipun telah mendapatkan kemerdekaan, Sudan masih tetap mengalami berbagai isu agama dan politik yang berujung pada konflik berdarah.

Pasca kemerdekaan, terjadi pengelompokan yang membagi Sudan menjadi dua wilayah, yaitu wilayah utara yang dihuni oleh etnis arab yang menjadi pusat pemerintahan dan juga wilayah selatan yang dihuni oleh etnis afrika. Meskipun jumlah Etnis Arab tidak lebih banyak dari jumlah Etnis Afrika, akan tetapi Etnis Araba lebih mendominasi dalam pemerintahan di Sudan. Pengelompokan tersebut merupakan awal mula terjadinya isu-isu pertikaian hingga terjadinya konflik berkepanjangan. Wilayah selatan Sudan selalu dieksploitasi oleh pihak pemerintah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di wilayah utara. Bahkan diketahui kalau di pertengahan wilayah antara Sudan Utara dan Sudan Selatan terdapat wilayah yang bernama Abyei yang menghasilkan minyak dan dapat memberikan keuntungan

yang cukup besar bagi pihak yang mengelolanya. Perang saudara pertama kali terjadi karena penduduk bagian selatan sering kali tidak dilibatkan oleh pemerintah dalam urusan politik seperti tidak boleh ikut dalam pemilu. Selain itu, berbagai kebijakan yang dibuat oleh pihak pemerintah cenderung memberatkan penduduk di wilayah selatan. Oleh karena itu, pada saat itu konflik antara masyarakat di wilayah selatan dengan pihak pemerintah pun tidak dapat dihindari (Putri 2017:85).

Perang yang terjadi antara suku Anyanya dengan pihak pemerintah berlangsung cukup lama hingga tahun 1972 dengan ditandatangani perjanjian Addis Albaba yang menghasilkan daerah otonomi khusus di Sudan bagian selatan. Akan tetapi, beberapa saat setelah perjanjian tersebut, konflik kembali terjadi. Pada tahun 1983 Presiden Sudan Ja'far Nimeiri mengeluarkan kebijakan yang memancing amarah masyarakat yang tinggal di wilayah selatan, yaitu memberlakukan politik islamisasi. Suku-suku asli di Sudan Selatan, yaitu suku Nuba, suku Ingesana, dan suku uduk menjadi korban dari politik islamisasi tersebut. Banyak penduduk yang mendapat diskriminasi dan perlakuan tidak menyenangkan karena adanya politik islamisasi tersebut. Pemerintah telah menambang secara paksa berbagai mineral dan juga minyak yang berada di wilayah selatan, akan tetapi wilayah selatan tidak mendapatkan bagian dan tidak adanya peningkatan infrastruktur. Kemudian di tahun 1989 saat Presiden Omar Al-Bashir dilantik, ia menginginkan Sudan menjadi negara islam sepenuhnya, akan tetapi penduduk di wilayah selatan yang tidak menganut islam menolak dan melakukan pemberontakan (International Rescue Committee 2014:7).

Di masa pemerintahan Presiden Omar Al-bashir, telah dilaporkan adanya beberapa dugaan kejahatan berat, salah satunya adalah pembantaian missal, penyiksaan, pemerkosaan, dll. Permasalahan yang terjadi di Darfur berupa pelanggaran hak asasi manusia dan juga kejahatan perang diduga dipicu oleh Presiden Omar Al-bashir. Berbagai peringatan telah diberikan, akan tetapi belum ada perubahan yang terjadi terhadap konflik-konflik di Darfur dan di wilayah lainnya. Presiden Omar Al-bashir telah ditetapkan sebagai tersangka utama atas terjadinya pelanggaran hukum humaniter dan pelanggaran hak asasi manusia oleh International Criminal Court (ICC). Diketahui ICC telah mencoba melakukan penangkapan beberapa kali, pada 14 juli 2008, 4 maret 2009, 12 juli 2010, dll. Akan tetapi, hingga april 2018 status penangkapan Presiden Omar Al-bashir masih ber-status *pending* dan belum ada update berita lebih lanjut (Case Information Sheet, 2018).

Dalam melakukan perlawanan terhadap pihak pemerintah, penduduk di wilayah selatan membentuk pasukan *Sudan People Liberation Movement/Army* (SPLM/A) yang telah bersenjata lengkap. Untuk menanggulangi pihak pemberontak, pihak pemerintah pun membentuk kelompok yang diberi nama Janjaweed, yang beranggotakan tentara bayaran khusus untuk menghadapi pihak pemberontak. Konflik yang terjadi di wilayah Darfur ini telah terhitung sebagai kasus kejahatan kemanusiaan yang cukup berat dan bahkan telah masuk ke dalam kategori genosida karena pihak pemerintah tidak memberi ampun kepada masyarakat yang menolak untuk mengikuti ajaran islam. Pasukan Janjaweed telah dilaporkan tengah melakukan pembersihan etnis di wilayah Darfur bagian selatan. Mereka dilaporkan telah

membunuh para laki-laki, memperkosa para perempuan dan juga menculik anak-anak. Karena kasus kejahatan kemanusiaan ini, pihak pemberontak kembali menuntut hak mereka untuk diperlakukan secara adil dalam bidang hukum dan ekonomi, sebagaimana yang mereka sampaikan dalam press release pada tanggal 14 maret 2002:

“a united democratic Sudan ... predicated on full acknowledgment of Sudan’s ethnic, cultural, social, and political diversity. Viable unity, therefore, must be ultimately based on the right of self-determination.... The fundamental imperatives of a viable unity are an economy and political system that address the uneven development and marginalization that have plagued the country since independence.... Religion and politics ... must be kept in their respective domains, with religion belonging to the personal domain and the state in the public domain... . SPLM/A firmly opposes ... the Khartoum Government’s policies of using some Arab tribes ... to achieve its hegemonic devices that are detrimental both to Arabs and non-Arabs... . [Consequently], the brutal oppression, ethnic cleansing, and genocide sponsored by the Khartoum Government [have] left the people of Darfur with no other option but to resort to popular political and military resistance for the purpose of our survival”(Totten&Makusen, 2006:10)

"Sudan demokratis yang bersatu ... didasarkan pada pengakuan penuh atas keragaman etnis, budaya, sosial, dan politik Sudan. Kesatuan yang layak, oleh karena itu, pada akhirnya harus didasarkan pada hak penentuan nasib sendiri Keharusan mendasar dari persatuan yang layak adalah sistem ekonomi dan politik yang menangani pembangunan dan marginalisasi yang tidak merata yang telah menjangkiti negara ini sejak kemerdekaan Agama dan politik ... harus disimpan dalam domain masing-masing, dengan agama milik domain pribadi dan negara dalam domain publik SPLM / A dengan tegas menentang ... kebijakan Pemerintah Khartoum tentang penggunaan beberapa suku Arab ... untuk mencapai perangkat hegemoniknya yang merugikan baik bagi orang Arab maupun non-Arab [Akibatnya], penindasan brutal, pembersihan etnis, dan genosida yang disponsori oleh Pemerintah Khartoum [telah] membuat rakyat Darfur tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan perlawanan politik dan militer populer untuk tujuan bertahan hidup kita ”

Kedua belah pihak telah beberapa kali menandatangani perjanjian damai, salah satunya adalah gencatan senjata di tahun 2003 selama 45 hari yang digagas oleh Idriss Deby, Presiden Chad. Akan tetapi, perjanjian tersebut ternyata tidak terlalu menghasilkan titik terang dari permasalahan kedua negara tersebut karena pihak SPLM/A dan JEM terbukti melakukan pelanggaran terhadap perjanjian tersebut. Kemudian pada Mei 2004 Uni Afrika membantu perundingan kedua belah pihak di Addis Albaba dengan cara meminta kedua belah pihak untuk melakukan gencatan senjata lagi dan kemudian disetujui oleh kedua pihak. Dalam perundingan ini, ditandatangani perjanjian *The Agreement on the Modalities for the Establishment of the Ceasefire Commission and Deployment of Observers*¹. Kemudian perundingan ini berlanjut ke *Comprehensive Peace Agreement*² yang ditandatangani oleh *National Congress Party* dan SPLM/A pada 9 Januari 2005 di Abuja yang dimana akan menjadi dasar-dasar pertimbangan terjadinya referendum Sudan Selatan, lalu berlanjut ke *Declaration of Principle*³ pada Mei 2005 yang ditandatangani oleh pemerintah Sudan dan juga pihak SPLM/A.

¹ Perjanjian ini dibuat untuk melakukan pengurangan senjata demi mengurangi korban dan kerugian dari kedua belah pihak. Dalam perjanjian ini, dipertemukan perwakilan dari kedua belah pihak yang ditengahi oleh Presiden Chad, Uni Afrika, Amerika Serikat, dan juga PBB. Melalui perjanjian ini diharapkan dapat menemukan titik terang dalam penyelesaian konflik Sudan.

² Perjanjian ini dibuat untuk menghentikan perang saudara yang telah terjadi sejak tahun 1980 di Sudan, dan bertujuan untuk membagikan hasil dari produksi minyak secara adil bagi kedua belah pihak demi kebaikan bersama. Perjanjian ini juga dijadikan acuan penentu terjadinya perdamaian di Sudan.

³ Declaration of Principle berisikan tentang inisiasi tindakan untuk perdamaian kedua belah pihak. Dalam DoP, telah tertulis beberapa resolusi yang telah disepakati dan diterima oleh kedua belah pihak. Perjanjian-perjanjian yang dilibatkan meliputi penyelesaian permasalahan konflik Sudan (ras, suku, agama, dll), solusi militer dan politik, dan juga adanya perjanjian damai bagi kedua belah pihak.

Setelah melewati berbagai perundingan dan perjanjian, permasalahan yang terjadi di kedua belah pihak masih belum menemukan titik terang, hingga pada tahun 2009 dibuatlah *referendum act*⁴ yang berfungsi sebagai acuan terjadinya referendum. Keputusan untuk melakukan referendum telah disetujui secara tegas oleh berbagai elit politik dari Sudan Selatan dan juga dengan adanya dukungan dari masyarakat yang merasa bahwa dengan terjadinya referendum maka mereka dapat mendapatkan hak-hak mereka kembali.

Referendum yang dilakukan untuk memisahkan diri dari Sudan dan membentuk negara baru dilakukan untuk menentukan nasib penduduk yang berada di wilayah selatan Sudan. Melalui *Comprehensive Peace Agreement* sebagai pedoman, di tahun 2009 dibuatlah referendum act yang menjadi dasar-dasar dan juga sebagai acuan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan-persyaratan untuk melakukan referendum. Menurut *Referendum Act*, referendum valid hanya jika jumlah vote setidaknya 60% dari *voter* memilih untuk merdeka. Referendum akan dilaksanakan di Sudan bagian utara, selatan dan delapan lokasi di negara lain. *Referendum center* bisa didirikan di tempat dimana paling tidak ada 20.000 *voter*. Menurut *Referendum Act*, *internally displaced persons* berhak menjadi *voter* dan ada tiga kategori yang berhak menjadi *voter*, yaitu yang lahir dari paling tidak satu orang tua penduduk asli Sudan bagian selatan yang tinggal di Sudan bagian selatan/ sebelum 1 Januari 1956; yang leluhurnya bisa ditemukan pada etnis Sudan bagian selatan tanpa paling tidak satu

⁴ Menurut referendum act, pemisahan Sudan Selatan sebagai negara merdeka akan terjadi apabila lebih dari 60% orang melakukan voting setuju untuk merdeka antara kedua belah pihak dan juga adanya batas minimal orang-orang yang akan melakukan voting.

orang tuanya penduduk asli Sudan bagian selatan/ sebelum 1 Januari 1956; dan yang penduduk tetap Sudan bagian selatan sejak 1 Januari 1956 (The New York Times 2015).

Referendum pemisahan diri Sudan bagian selatan diatur oleh *Southern Sudan Referendum Commission* yang merupakan lembaga independen yang berbasis di Khartoum dan Southern Sudan Referendum Bureau yang merupakan anak dari Southern Sudan Referendum Commission berbasis di Juba. Registrasi *voter* dilakukan dari 15 November 2010 sampai 8 Desember 2010 dan referendum dilakukan pada 9 Januari 2011 sampai 15 Januari 2011. Hasil dari referendum diumumkan secara resmi pada 7 Februari 2011 dengan hasil 97,58% dari 3.947.676 *voter* menginginkan Sudan bagian selatan merdeka dari Sudan (European Union Election Observation Mission 2011). Sudan Selatan secara resmi menjadi negara baru pada 9 Juli 2011 dengan nama resmi Republic of South Sudan, tepat 6 tahun setelah berlakunya CPA.

Tabel 4.3 Perjanjian Sudan dan Sudan Selatan



4.2 Lahirnya Sudan Selatan

Sudan Selatan memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 9 Juli 2011 melalui hasil *referendum* yang dilaksanakan mulai tanggal 9 Januari 2011. Sebagian besar rakyat wilayah selatan memilih untuk memisahkan diri dari pemerintahan pusat Sudan dan mendirikan negara baru Sudan Selatan. Sebagai negara yang baru merdeka, banyak tantangan yang harus dihadapi oleh Sudan Selatan. Meskipun telah merdeka, konflik masih terus berlanjut di kedua negara tersebut, salah satunya adalah konflik memperebutkan sumber daya alam berupa minyak bumi. Alasan mengapa konflik ini dapat terjadi karena wilayah Abyei yang berada ditengah wilayah kedua negara tersebut yang juga merupakan wilayah yang menjadi sumber penghasil minyak di Sudan. Pada saat itu, perusahaan minyak yang masih berada di Sudan adalah Petro

Energy dan Greater Nile Petroleum Operating Company (GNPOC), sedangkan perusahaan minyak yang menjadi aktif di Sudan Selatan adalah Petrodar, GNPOC, dan White Nile Petroleum Operating Company (WNPOC)/Thar Jath.

Sebelum Comprehensive Peace Agreement (CPA), beberapa upaya perdamaian pernah diusahakan oleh pemerintah Sudan dengan SPLM/A. Salah satu pihak yang membantu dalam perundingan perdamaian antara pemerintah Sudan dengan SPLM/A adalah IGAD. Seperti halnya yang tertuang dalam kalimat pembuka pada CPA bahwa GoS dan SPLM/A, telah melakukan pertemuan dan negosiasi yang berkelanjutan antara Mei 2002 dan Desember 2004, di Karen, Machakos, Nairobi, Nakuru, Nanyuki dan Naivasha-Kenya dibawah naungan Intergovernmental Authority On Development (IGAD)⁵ (Breilid, 2014:324).

Negara-negara anggota IGAD berhasil membawa kedua pihak ke meja perundingan yang berakhir pada perjanjian perdamaian Comprehensive Peace Agreement pada tahun 2005. Comprehensive Peace Agreement ada sebagai bukti dari keterlibatan pihak-pihak luar seperti Uni Afrika, PBB, IGAD. CPA menghasilkan 8 poin penting yang nantinya akan diterapkan pada wilayah utara dan selatan. Berikut 8 poin yang disetujui pada CPA yang ditandatangani pada 9 Januari 2005:

- Masa *interim* akan dimulai, semua kewajiban dan komitmen yang ditentukan dalam CPA akan mengikat sesuai dengan ketentuan tersebut.

⁵ IGAD adalah Otoritas Antar Pemerintah di Afrika Timus yang bergerak dibidang pembangunan yang didirikan pada tahun 1996 untuk menggantikan Intergovernmental Authority on Drought and Development (IGADD) yang didirikan pada tahun 1986.

- CPA harus terdiri dari teks-teks Protokol dan Perjanjian yang sudah ditandatangani bersama-sama, Perjanjian Gencatan Senjata Permanen dan Modalitas Keamanan nasional.
- Teks Arab dan Inggris yang disepakati dari CPA akan baik menjadi resmi dan otentik. Namun, dalam terjadi perselisihan mengenai arti dari suatu ketentuan teks, dan hanya jika ada perbedaan dalam teks antara Arab dan teks bahasa Inggris; teks bahasa Inggris akan menjadi lebih baik yang digunakan sebagai bahasa perundingan perdamaian.
- Setelah kompilasi dari teks Arab dan bahasa Inggris yang resmi dan otentik dari CPA, salinan diparaf kedua teks akan diberikan kepada kedua belah pihak, dan salinan juga harus diajukan kepada PBB, Uni Afrika, IGAD sekretariat di Djibouti, Liga Arab dan Republik Kenya.
- Semua pihak yang menjalankan fungsi dalam pemerintahan akan terus melakukannya ditempat dimana mereka memberikan layanan tersebut atau melakukan fungsi tersebut kecuali atau sampai didistribusikan atau instruksi alternatif diterima sesuai dengan pengaturan disetujui oleh Para Pihak.
- JNTT, ABC, Tim Tugas Konstitusi dan Tim Gabungan Teknis "New National Currency" diperlukan untuk memfasilitasi dan mempersiapkan operasionalisasi perjanjian, setelah perjanjian itu diberlakukan;
- Mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan yang efektif dari Gencatan Senjata Permanen;
- Mengambil langkah-langkah seperti yang diperlukan untuk memastikan bahwa sumber daya dan dana yang tersedia untuk pembentukan struktur, badan dan lembaga yang diatur oleh CPA terutama pembentukan Pemerintah Sudan Selatan.

Pada masa *interim*⁶, kedua pihak antara SPLM/A dan pemerintah Sudan berupaya untuk menemukan solusi dari berbagai masalah politik yang masih diperdebatkan. Mulai dari pendapatan minyak dan demarkasi perbatasan dari wilayah Abyei. Batas wilayah antara Sudan bagian utara dengan Sudan bagian Selatan Wilayah Abyei merupakan wilayah yang masih menjadi konflik hingga saat ini. Secara teritorial, wilayah Abyei termasuk dalam wilayah Kordofan Selatan. Wilayah Abyei

⁶ Saat dimana kedua belah pihak tidak berkonflik karena telah dilaksanakannya referendum untuk sementara waktu

selanjutnya diberikan hak khusus seperti yang tertuang dalam Prinsip Perjanjian Abyei. Penduduk wilayah Abyei juga akan menjadi penduduk dari Kordofan Barat (wilayah utara Sudan) dan Bahrul Ghazal (wilayah selatan Sudan). Perbedaan antara *referendum* wilayah selatan dengan Abyei adalah *referendum* wilayah selatan dilaksanakan untuk menentukan apakah tetap bersatu dengan pemerintahan Sudan atau melepaskan diri dan mendirikan negara baru. Sedangkan *referendum* Abyei dilaksanakan untuk menentukan apakah Abyei ikut dalam pemerintahan Sudan diutara atau bergabung menjadi bagian dari wilayah selatan.

Tabel 4.4 Profil Negara Sudan Selatan 2019

| | | |
|---|---------------------|---|
| 1 | Nama Resmi | The Republic of South Sudan |
| 2 | Kepala Negara | Salva Kiir Mayardit |
| | Wakil Kepala Negara | Riek Machar |
| 3 | Ibukota | Juba |
| 4 | Luas Wilayah | 619745 km ² |
| 5 | Bahasa | - Arab (bahasa resmi) - Nubian - Inggris |
| 6 | Mata Uang | Pounds Sudan Selatan |
| 7 | Lagu Kebangsaan | <i>El Salam Al Wathoni</i> |
| 8 | Hari Nasional | 1 Januari (Hari Kemerdekaan) 30 Juni (Revolusi Keselamatan Nasional/ <i>Al Inqaz Al Wathani</i>) |

Tabel Diolah Dari: (CIA.gov, 2018)

4.3 Negara yang memiliki pengaruh dalam disintegrasi Sudan dan Sudan Selatan

4.3.1 Mesir

Mesir diketahui telah memiliki hubungan yang cukup dalam dengan Sudan. Sejarah panjang Sudan dan Mesir terjadi akibat kontak pertama antara penduduk di Utara Afrika/Mesir dengan penduduk kulit hitam terjadi di sepanjang sungai Nil pada abad ke-3 SM yang kemudian dikenal dengan nama Nubia. Pada abad ke-6 misionaris Kristen memasuki Sudan dari Mesir, namun penyebaran agama ini terdesak oleh Nubia-Arab yang muslim. Agama Kristen tumbuh dan berkembang pada abad ke-18 sampai abad 19 dan dapat bertahan diwilayah Sudan Selatan hingga sekarang. Pada abad ke-18 Mesir merupakan wilayah kemaharajaan Turki *Othman Empire* dan Sudan termasuk didalamnya. Setelah kekuasaan Turki surut muncul Inggris sebagai penguasa baru di Mesir dan Sudan

Di abad ke 19, Mesir diketahui telah melakukan invansi terhadap Sudan. Sebagai bagian dari *Anglo-Egyptian Condominium*⁷ (1899-1956), hal tersebut memiliki pengaruh besar terhadap bentuk perkembangan Sudan sejak awal merdeka. Faktor penyebab adanya pengaruh terhadap perkembangan Sudan adalah wilayah Khartoum (Ibukota Sudan) pada saat mendeklarasikan kemerdekaannya mendapat dukungan dan bantuan dari Mesir yang dulu pernah menjajah negara tersebut. Pengaruh dari Mesir terhadap Sudan kemudian mulai berkurang di masa Kementrian Luar Negeri Sadiq Al-mahdi di tahun 1986-1989. Hal tersebut dikarenakan adanya

⁷ Bagian dari wilayah kekuasaan Inggris-Mesir dari masa penjajahan

kelompok Islam Radikal Hasan Al-turabi di Mesir. Kelompok tersebut diketahui mendominasi National Congress Party (NCP) dari tahun 1989-1999. Pada saat itu, kelompok islam radikal tersebut memiliki hubungan yang cukup dekat dengan pihak oposisi di Mesir, The Muslim Brothers, dan menginginkan kebijakan Islam yang sangat ketat dan dapat dinilai agresif dalam proses penyebarannya. Pihak islam radikal tersebut diketahui memiliki hubungan dengan pihak SPLM/A yang berada di Sudan, hal tersebut yang membuat hubungan Mesir dan Sudan menjadi berkurang. NCP menyatakan kalau mereka menyalahkan Comprehensive Peace Agreement antara rezim NCP yang berada di Khartoum dan juga pihak SPLM/A yang mempengaruhi Mesir sehingga mereka merasa dirugikan. Kemudian di tahun 1990 hubungan antara Kairo dan Khartoum menjadi semakin buruk karena adanya tindakan percobaan pembunuhan terhadap Presiden Mubarak di Mesir dan adanya keterlibatan pihak pemerintahan Khartoum.

Di tahun 2002, pemerintahan Khartoum merasa terlalu lemah dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan pihak SPLM/A yang meminta untuk menetapkan waktu merdeka. Karena adanya permasalahan dengan Kairo, maka pihak Sudan pun mendapatkan kesulitan karena kehilangan bantuan yang cukup berarti dari negara tetangganya. Lemahnya pemerintahan di Khartoum disebabkan oleh pengaruh dari NCP yang ternyata memberikan dampak buruk bagi pemerintahan Sudan. Kebijakan di Mesir lebih berpihak pada NCP yang kemudian meningkatkan isolasi terhadap Mesir. Diketahui pula adanya keterlibatan Amerika dalam keterkaitan tindakan yang dilakukan oleh NCP yang kemudian berujung pada penandatanganan Machakos

Protocol⁸ yang memberikan jalan kepada referendum Sudan Selatan. Mesir pada saat itu masih mendapatkan dilema, apakah dapat mengambil keuntungan dari pihak oposisi Sudan atau tidak.

Dengan adanya transisi kekuasaan dan politik di Sudan, hal tersebut dapat memberikan pengaruh yang cukup besar bagi Mesir. Hal tersebut terlihat dari berkurangnya pengaruh agama di Sudan yang diberikan oleh Mesir karena Sudan Selatan lebih memilih untuk merdeka. Ekonomi di Mesir pun mendapatkan dampak yang cukup signifikan dari merdekanya Sudan Selatan karena terpecahnya kedua Sudan dan kerjasama antara kedua negara tersebut pun terhambat (PRIO Paper, 2010:5).

Sudan merupakan salah satu focus penting dari keamanan nasional Mesir, meskipun permasalahan dengan negara-negara yang berada di Timur Tengah dan juga negara-negara yang berada di wilayah Afrika Utara masih harus diperhatikan. Selain karena faktor masa lalu, Sudan dapat mempengaruhi keamanan nasional Mesir dengan dua cara, yaitu; karena Sudan dan Mesir merupakan negara yang saling berbagi batas wilayah, berbagai kebijakan baik keamanan maupun politik antara kedua negara tersebut saling mempengaruhi satu sama lain dan menjadi kunci penting untuk relasi kedua negara. Kedua, Sudan merupakan suatu negara yang memiliki

⁸ Perjanjian kerangka kerja ini dibuat untuk memulai kembali proses perdamaian di Sudan dan menguraikan prinsip-prinsip dan isu-isu yang akan dibahas dalam pembicaraan substantif di masa depan untuk menyelesaikan konflik Sudan dan Sudan Selatan. Protokol ini menetapkan prinsip-prinsip tata kelola, proses transisi dan struktur pemerintahan. Protokol ini juga menetapkan prinsip penentuan nasib sendiri bagi rakyat Sudan Selatan. Para pihak sepakat untuk melanjutkan perundingan tentang masalah-masalah luar biasa tentang pembagian kekuasaan, pembagian kekayaan, hak asasi manusia dan gencatan senjata pasca referendum.

peran dan pengaruh yang cukup besar di Benua Afrika karena besarnya pasokan minyak bumi yang terdapat di wilayah Abyei.

4.3.2 Uganda

Uganda bukanlah termasuk negara yang besar, akan tetapi Uganda memiliki hubungan yang sangat penting dengan Sudan. Hal tersebut dikarenakan Meskipun Sudan dan Uganda saling berbagi batas wilayah dan juga adanya kesamaan di masa lalu dimana kedua negara merupakan bekas jajahan Inggris, perang saudara yang terjadi di Sudan pada saat itu memaksa Uganda untuk mengembangkan kebijakan yang lebih aktif antara satu sama lain. Diketahui kalau pemerintah Uganda dan juga Presiden Yoweri Museveni memiliki hubungan dengan *Sudan People's Liberation Movement/Army* (SPLM/A) dan juga dikenal sebagai pendukung dari luar negeri yang cukup berpengaruh. Pihak SPLM/A meminta bantuan kepada Uganda untuk mempersiapkan dan juga berbagai kebutuhan yang kemudian akan sangat dibutuhkan untuk melakukan referendum pada Januari 2011 yang akan menentukan apakah Sudan Selatan akan berpisah dari Sudan atau tidak. Sementara itu, meskipun ada pemulihan hubungan pada tahun 2001, hubungan antara Kampala dan Khartoum secara bertahap memburuk dan tampaknya menjadi semakin tegang. Terlepas dari hasil referendum, tidak diragukan lagi akan mempengaruhi hubungan masa depan antara Uganda dan Sudan (utara dan selatan). Masih ada beberapa ketidakpastian

tentang siapa yang melempar batu pertama dalam perang proxy⁹ yang berkembang antara Khartoum dan Kampala (Prior Paper, 2010:2).

Akibat dari hal tersebut, kemudian menciptakan dilema bagi pemerintah Uganda, yang ingin memberikan perlindungan kepada "saudara-saudaranya" Afrika, tetapi perlu mempertahankan hubungan baik dengan rezim-rezim berturut-turut di Khartoum. Selama pergolakan di tahun 1980-an, banyak orang Uganda yang melarikan diri ke Sudan. Kemudian situasi tiba-tiba berganti, di tahun 1980-an saat terjadinya perang saudara kedua Sudan mencapai daerah perbatasan, pengungsi Uganda kembali ke rumah dan sekali lagi warga Sudan Selatan mencari perlindungan di Uganda. Pada awal 1990-an, setelah rezim Islamis Hasan al-Turabi dan Presiden Omar al-Bashir didirikan, hubungan Sudan dan Uganda memburuk. Pada pertengahan 1990-an Uganda, seperti Eritrea dan Ethiopia, telah menjadi pendukung kuat SPLM / A. Bersamaan dengan itu, rezim di Khartoum mulai melatih, memberi makan dan mempersenjatai *Lord's Resistance Army* (LRA) yang dipimpin oleh Joseph Kony. Dukungan timbal balik Khartoum dan Kampala untuk pemberontakan memiliki kontribusi pada kekerasan dan gangguan berskala besar di Uganda utara dan intensifikasi perang saudara di Sudan Selatan.

Keterlibatan pemerintah Uganda dalam proses referendum Sudan Selatan dan setelahnya memiliki dua motif utama: pertama, masalah keamanan atas berlanjutnya keberadaan LRA, dan implikasi dari konflik internal yang baru di Sudan Selatan; dan

⁹ perang ketika lawan kekuatan menggunakan pihak ketiga atau perwakilan sebagai pengganti dalam konflik antara satu sama lain secara langsung.

kedua, kepentingan sosial-politik dan ekonomi dalam mengarahkan kembali Sudan Selatan ke Afrika timur dan memperluas peluang perdagangan Uganda di sana. Kebijakan Sudan-Uganda dibentuk dan dikelola oleh Presiden Museveni. Meskipun kontakannya dengan Government of South Sudan (GoSS) Presiden, Salva Kiir Mayardit, tidak seperti hubungan dekatnya dengan Garang, keduanya tetap dapat berkomunikasi secara teratur. Hubungan diplomatik antara Sudan Selatan dan Uganda dijaga dengan baik melalui konsulat Uganda di kantor penghubung Juba dan GoSS di Kampala dan Gulu. Uganda telah mengembangkan kerjasama strategis dengan GoSS melalui pembangunan kapasitas kelembagaan dan militer, termasuk pelatihan pegawai negeri sipil di Sudan Selatan. Pemerintah Uganda secara resmi mempertahankan sikap “menunggu dan melihat” dan berpegang teguh pada komitmennya untuk menghormati setiap hasil referendum, selama itu dilakukan secara bebas dan adil. Akan tetapi, ketertarikan Uganda terhadap pemisahan diri Sudan Selatan dapat dilihat secara jelas, dan meskipun keterlibatannya di Sudan Selatan digambarkan sebagai mendorong dan membantu GoSS untuk mempersiapkan penentuan nasib sendiri, kontakannya dengan rezim di Khartoum dapat dibilang terbatas dan agak tidak mudah.

Inti dari kepentingan pemerintah Uganda dalam proses referendum Sudan Selatan bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut. Meskipun LRA belum beroperasi di tanah Uganda sejak 2008, besarnya organisasi dan lokasi persis anggotanya tetap tidak diketahui, dan kelompok pemberontak terus menjadi ancaman keamanan lintas batas. Diketahui banyak pihak yang percaya kalau secara luas di Sudan Selatan dan Uganda bahwa Khartoum terus mendukung LRA

baik secara logistik maupun militer. Meskipun kekurangan bukti, bukan tidak mungkin bahwa rezim Khartoum akan menggunakan kembali LRA sebagai kekuatan proksi melawan SPLM dan Uganda jika konflik bersenjata antara Sudan Utara dan Selatan kembali. Selama beberapa dekade terakhir di kala itu, kerja sama dengan Amerika Serikat telah menjadi bagian penting dari strategi Museveni untuk melindungi kepentingan keamanan Uganda. Meskipun tidak mempersenjatai orang-orang di wilayah Selatan secara langsung, pemerintah Amerika Serikat mendukung SPLM/A, dan Uganda dipercaya memiliki peran penting sebagai perantara dalam mendukung kedua kubu.

Tak lama setelah serangan 11 September 2001, Uganda mengadopsi undang-undang anti-terorisme, dan sejak itu menjadi sekutu dekat Amerika Serikat dalam perang melawan terorisme internasional. Selama "*Operation Iron Fist*" melawan LRA pada tahun 2002, Amerika Serikat menawarkan dukungan logistik dan militer kepada *Uganda People's Defence Force* (UPDF). Ada banyak simpati di dalam pemerintah Amerika Serikat dan opini publik Amerika untuk tujuan Selatan, dan Uganda mungkin berguna sebagai penyalur dukungan Amerika Serikat ke Sudan Selatan jika kemerdekaannya diperdebatkan. Uganda khawatir kalau LRA dapat digunakan dalam konflik bersenjata baru di Sudan. Baik Khartoum dan SPLM secara terbuka telah meningkatkan kapasitas militer mereka untuk persiapan jika terjadi perang antara Utara dan Selatan. Penyedia senjata dan sekutu asing utama dari pihak utara adalah Tiongkok, Uganda menawarkan pelatihan kepada tentara SPLA dan memungkinkan senjata dan pasokan diangkut melalui wilayah Uganda.

Uganda, yang secara historis merupakan sekutu setia Sudan Selatan, kini juga mencari hubungan yang lebih konstruktif dengan Sudan. Proses saat ini - formal dan informal, publik dan swasta - menangani serangkaian tantangan yang lebih luas yang secara historis menghambat hubungan baik antara ketiga negara. Tawaran baru ini didorong oleh krisis ekonomi Sudan Selatan, ditambah dengan keinginan Uganda dan Sudan untuk melindungi kepentingan mereka di negara itu. Sudan Selatan memiliki cadangan minyak yang besar, yang diekspor melalui Sudan, tetapi produksinya turun tajam dengan meletusnya perang saudara pada Desember 2013. Dengan berakhirnya perang saudara, Juba sekarang ingin menegosiasikan kembali ketentuan-ketentuan perjanjian transfer minyak 2012 yang mengamankan besar pembayaran ke Sudan, dengan alasan bahwa kesepakatan baru perlu mencerminkan penurunan harga global dan kesulitan keuangan pasca-perang saudara sendiri. Sementara Juba menginginkan pengaturan baru dengan Sudan, kesepakatan seperti itu diyakini Uganda akan datang dengan ikatan historis (The New York Times, 2018).

Ada banyak interaksi yang terjadi antara orang-orang Uganda dan Sudan Selatan dalam banyak hal, termasuk perdagangan, pendidikan dan tempat tinggal bersama para pengungsi. Sejak penandatanganan CPA, ekspor Uganda ke Sudan Selatan telah berkembang pesat, Uganda saat ini dianggap merupakan populasi asing terbesar di sana. Referendum Sudan Selatan secara langsung memiliki keterkaitan dengan kepentingan ekonomi Uganda di wilayah tersebut. Para pedagang Uganda telah mendapat manfaat dari stabilitas relatif di Sudan Selatan sejak ratifikasi CPA dan penghapusan LRA dari wilayah perbatasan. Meskipun sebagian besar terbatas

pada wilayah bagian Selatan, Sudan sekarang merupakan salah satu pasar ekspor terbesar Uganda, pada tahun 2008 total ekspor resminya diperkirakan mencapai USD 260 juta (ICG 2010:5).

Sejak 2005 pemerintah Uganda telah berupaya mengintegrasikan Sudan Selatan ke dalam ekonomi *East African Community* (EAC). Berbeda dengan strategi pemerintah Uganda untuk mempertahankan dan memperluas kerja sama dengan Sudan Selatan. Para pemimpin NCP yang berkuasa di Sudan nampak tidak senang dengan apa yang mereka anggap sebagai dorongan nyata pemisahan diri Uganda di Sudan Selatan. Untuk bagiannya, Khartoum dituduh terus mendukung LRA, yang Uganda anggap sebagai ancaman keamanan. Keterlibatan Uganda setelah pemisahan diri akan sangat tergantung pada kondisi di Sudan Selatan. Aparat negara yang lemah dan terbelakang, yang menjelang referendum telah berjuang keras untuk memberikan keamanan dan mengendalikan kekerasan lokal dapat menjadi mangsa eskalasi konflik internal yang tidak disengaja antara kelompok atau kepribadian yang bersaing.

4.3.3 Tiongkok

Meningkatnya kebutuhan energi minyak bumi untuk menstabilkan pertumbuhan ekonomi dan berkembangnya populasi yang cukup pesat mendorong Cina untuk memperluas pencarian alternatif sumber-sumber minyak bumi. Beberapa negara akan memandang Sudan Selatan sebagai lokasi yang ideal untuk sebuah usaha bisnis, tetapi Tiongkok telah membangun banyak reputasinya sebagai kekuatan dunia pada filosofi ekonomi pengambilan risiko. Tiongkok pertama kali memutuskan untuk

memasuki industri perminyakan di Sudan pada 1995, 16 tahun sebelum Sudan Selatan memperoleh kemerdekaan dan tepat di tengah-tengah Perang Saudara Sudan Kedua. Sanksi ekonomi Amerika Serikat terhadap Sudan, yang menghadapi tuduhan melakukan kejahatan perang di dalam negeri dan mendukung terorisme di luar negeri, tidak banyak menghalangi perusahaan Tiongkok yang ingin mengambil keuntungan dari cadangan minyak Sudan. Banyak keberhasilan Tiongkok di Afrika berasal dari kecenderungan kekuatan dunia untuk menghindari mengkritik sekutu yang mengabaikan hak asasi manusia dan hukum internasional. Pendekatan kebijakan luar negeri ini mendukung *Belt and Road Initiative*¹⁰, sebuah proyek yang dirancang untuk memperluas lingkup pengaruh Tiongkok di Global South (The Diplomats 2017).

Pemerintah Khartoum di sisi lain telah mendapat manfaat dari penjualan minyak Sudan ke Cina sampai tingkat di mana Sudan tidak pernah mendapatkan manfaat di masa lalu dari satu pedagang tunggal. Manfaat-manfaat ini datang dalam berbagai bentuk. Sudan telah dibayar miliaran dolar oleh perusahaan-perusahaan minyak Cina yang terdengar seperti ekonomi dasar 101 dan orang akan berpikir bahwa menjual minyak ke Cina adalah hal yang baik untuk ekonomi Sudan. Sayangnya, hal tersebut belum terjadi. Kekayaan baru yang didapat telah membantu rezim Bashir untuk melanjutkan konflik hingga perang tanpa henti di Sudan Selatan,

¹⁰ suatu strategi pembangunan yang diusulkan oleh pemimpin tertinggi Tiongkok Xi Jinping yang berfokus pada konektivitas dan kerja sama antara negara-negara Eurasia, terutama Republik Rakyat Tiongkok (RRT), , Sabuk Ekonomi Jalur Sutra (SREB) berbasis daratan dan Jalur Sutra Maritim (MSR) lintas samudra. Strategi tersebut menegaskan tekad Tiongkok untuk mengambil peran lebih besar dalam urusan global dengan sebuah jaringan perdagangan yang berpusat di Tiongkok

Kordofan Selatan, Nil Biru, Abyei, dan Darfur. Sejak Khartoum mulai menandatangani perjanjian minyak dengan perusahaan minyak Cina, Sudan telah memperoleh lebih banyak senjata yang secara kemudian meningkatkan intensitas perang saudara di seluruh negeri. Di tempat-tempat seperti Darfur, Blue Niles dan Kordofan Selatan, pemerintah Khartoum telah melakukan banyak kekejaman yang beberapa di antaranya telah dilabeli sebagai genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan (Manyok, 2016:1).

Ketika Sudan dan Tentara Pembebasan Rakyat Sudan (SPLA), mengakhiri perang saudara Sudan kedua dengan CPA pada 2005, Tiongkok menyadari bahwa mayoritas cadangan minyak Sudan jatuh ke wilayah yang akan menjadi wilayah Sudan Selatan. Pada awal 2011, tahun kemerdekaan Sudan Selatan, Tiongkok National Petroleum Corporation (CNPC), mendirikan kantor di ibukota Sudan Selatan Juba. Sementara pecahnya perang Sipil Sudan Selatan pada 2013 memaksa CNPC untuk mengevakuasi kantor, perusahaan beroperasi di sana lagi dalam kurun waktu satu tahun kemudian. Perang Saudara Sudan Selatan telah memaksa Tiongkok untuk berurusan dengan berbagai dilema ekonomi dan militer. Konflik telah mengurangi separuh ekstraksi minyak bumi, yang memberikan kerugian yang cukup besar bagi CNPC. Pertempuran juga menghadirkan risiko bagi keselamatan karyawan CNPC. Kekerasan yang terjadi di Sudan Selatan akibat pecahnya perang saudara mengakibatkan kematian 14 pekerja minyak Tiongkok. Sejarah kebuntuan politik Sudan Selatan semakin membatasi peluang bagi Tiongkok di sana. Akan tetapi,

Tiongkok dapat membalikan situasi sehingga menimbulkan peluang yang lebih baik bagi masa depan investasi negaranya.

CNPC dapat mendapatkan berbagai manfaat dari perang saudara Sudan dan Sudan Selatan karena konflik yang berkepanjangan menghalangi pesaing perusahaan milik negara bahkan berpikir untuk menyentuh pasar. Sekarang setelah faksi terbesar pemberontak Sudan Selatan berkomitmen untuk rekonsiliasi, CNPC berdiri untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Meski begitu, keberhasilan ini tergantung pada umur panjang perdamaian di Sudan Selatan, di mana faksi lain terus memberontak melawan Kiir. Selain itu, Tiongkok dapat dibidang tidak mempertimbangkan situasi lokal dan juga tidak berupaya mempromosikan perdamaian dan stabilitas ldi Sudan. Para pejabat Tiongkok tahu berapa banyak kerusakan yang terjadi di Sudan sebagai akibat dari bisnis minyak Tiongkok dengan Republik Sudan dan hal tersebut bukan hanya gertakan atau pendapat. Pada tahun 2006, Panel Pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengutuk penjualan senjata Tiongkok ke Sudan dan menyatakannya sebagai pelanggaran total embargo senjata terhadap Sudan. Laporan tersebut menyatakan bahwa senjata dan peralatan militer Tiongkok telah ditemukan di Darfur dan digunakan oleh Pasukan Angkatan Darat Sudan melawan warga sipil di wilayah Darfur. Impor Senjata Sudan dari Cina terus meningkat dan begitu pula kerja sama militer antara Beijing dan Khartoum. Para pemimpin militer Tiongkok-Sudan terkemuka telah mengadakan beberapa pertemuan pada 2002, 2003, 2005, dan 2007. Pada bulan April 2007, Menteri Pertahanan Tiongkok, Mr. Cao Gangchuan secara

terbuka mengungkapkan bahwa kedua negara sedang bekerja lebih jauh untuk mengembangkan kerja sama militer di semua bidang (Manyok 2016:2).

4.3.4 Amerika Serikat

Amerika Serikat menjalin hubungan diplomatik dengan Sudan pada tahun 1956, setelah kemerdekaannya dari administrasi bersama oleh Mesir dan Inggris. Sudan memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat pada 1967 setelah dimulainya Perang Arab-Israel. Hubungan dibangun kembali pada tahun 1972. Sudan memutuskan hubungan diplomatik dengan AS pada Juni 1967, setelah pecahnya Perang Arab-Israel. Hubungan membaik setelah Juli 1971, ketika Partai Komunis Sudan berusaha untuk menggulingkan Presiden Nimeiri, dan Nimeiri mencurigai keterlibatan Soviet. Amerika Serikat memainkan peran penting dalam membantu menegosiasikan Perjanjian Perdamaian Komprehensif (CPA) 2005 antara Sudan dan pasukan Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM) yang meletakkan dasar bagi referendum kemerdekaan dan pemisahan diri Sudan Selatan 2011. Beberapa perselisihan antara Sudan dan Sudan Selatan masih belum terselesaikan pasca-kemerdekaan, termasuk demarkasi perbatasan dan status wilayah Abyei. Amerika Serikat mendukung upaya Uni Afrika (AU) untuk membantu negara-negara mengatasi masalah ini. Pada tahun 2003, orang-orang non-Arab di wilayah barat Darfur, yang sejak 1990 menuduh pemerintah melakukan diskriminasi sistematis dan penindasan, melakukan pemberontakan terhadap pemerintah dan juga memprotes beberapa dekade pengabaian politik dan ekonomi. Pemerintah dari wilayah utara merespons dengan kekuatan brutal, termasuk penggunaan milisi Arab yang dikenal

sebagai Janjaweed. Hingga saat ini, konflik di Darfur telah mempengaruhi 4,7 juta orang, termasuk lebih dari 1,76 juta orang yang terlantar secara internal (IDP) yang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Amerika Serikat mengkarakteristikan serangan pemerintah dan milisi terhadap warga sipil pada tahun 2004 sebagai genosida, dan Presiden Sudan Omar Hassan al-Bashir menghadapi dua surat perintah penangkapan Pengadilan Kriminal Internasional untuk perannya dalam konflik Darfur. Kekerasan dan kriminalitas oportunistik merusak prospek perdamaian berkelanjutan di Darfur (U.S. Relations With Sudan 2018).

Pada akhir 1985, ada pengurangan staf di Kedutaan Besar AS di Khartoum karena kehadiran di Khartoum dari sebuah kontingen besar teroris Libya. Pada April 1986, hubungan dengan Sudan memburuk ketika AS membom Tripoli, Libya. Pegawai Kedutaan Amerika Serikat dilaporkan ditembak pada 16 April 1986. Segera setelah insiden ini, semua personil diperintahkan untuk pergi selama kurang lebih 6 bulan. Hubungan AS dengan Sudan semakin tegang pada 1990-an. Sudan mendukung Irak dalam invasi ke Kuwait dan memberikan perlindungan dan bantuan kepada kelompok-kelompok teroris Islam. Pada awal dan pertengahan 1990-an, Carlos the Jackal, Osama bin Laden, Abu Nidal, dan para pemimpin teroris lainnya tinggal di Khartoum. Peran Sudan dalam Konferensi Islam Pan-Arab radikal mewakili masalah yang sangat memprihatinkan bagi keamanan para pejabat dan tanggungan Amerika di Khartoum, yang mengakibatkan beberapa penarikan dan / atau evakuasi personel A.S. dari Khartoum pada awal pertengahan 1990-an. Hubungan Islamis Sudan dengan organisasi teroris internasional mewakili masalah khusus yang menjadi perhatian bagi

Pemerintah AS, yang mengarah pada penunjukan Sudan tahun 1993 sebagai sponsor negara terorisme dan penangguhan operasi Kedutaan Besar AS di Khartoum pada tahun 1996. Pada Oktober 1997, AS memberlakukan ekonomi komprehensif, perdagangan, dan sanksi keuangan terhadap Sudan.

Pada tahun 1991, AS membuat sumbangan besar untuk mengurangi kekurangan makanan yang disebabkan oleh kekeringan dua tahun. Dalam kekeringan serupa pada tahun 2000 sampai tahun 2001, AS dan komunitas internasional merespons untuk mencegah kelaparan massal di Sudan. Pada tahun 2001, pemerintahan Bush menunjuk seorang utusan kepresidenan untuk perdamaian di Sudan untuk mengeksplorasi peran apa yang bisa dimainkan AS dalam mengakhiri perang saudara di Sudan dan meningkatkan pengiriman bantuan kemanusiaan.

Menanggapi keterlibatan berkelanjutan Pemerintah Sudan dalam kekerasan tanpa henti yang terjadi di Darfur, Presiden Bush memberlakukan sanksi ekonomi baru terhadap Sudan pada Mei 2007. Sanksi itu memblokir aset warga Sudan yang terlibat dalam kekerasan Darfur, dan juga memberi sanksi kepada perusahaan tambahan yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah. Pemerintah Sudan. Sanksi terus menggarisbawahi upaya AS untuk mengakhiri penderitaan jutaan rakyat Sudan yang terkena dampak krisis di Darfur. Terlepas dari perbedaan kebijakan, AS telah menjadi donor utama bantuan kemanusiaan ke Sudan sepanjang seperempat abad terakhir. AS adalah donor utama dalam "Operation Lifeline Sudan" Maret 1989, yang mengirimkan pasokan makanan yang cukup banyak ke wilayah yang dikuasai pemerintah dan SPLA di Sudan, sehingga mencegah bencana kelaparan yang meluas.

Dalam menghadapi kebutuhan kemanusiaan yang meluas yang disebabkan oleh konflik, perpindahan kekuasaan, dan bencana alam, Amerika Serikat telah menjadi donor utama bantuan kemanusiaan bagi rakyat Sudan sepanjang seperempat abad terakhir. Amerika Serikat telah menyatakan bencana yang terjadi di Sudan karena keadaan darurat yang dapat dibilang rumit setiap tahunnya sejak 1987. Sebagai donor internasional terbesar untuk bantuan kemanusiaan di Sudan, Amerika Serikat terus memberikan bantuan yang tidak memihak, berbasis kebutuhan untuk semua area dan populasi yang dapat diakses, termasuk pengungsi dan jika tidak, orang-orang yang terkena dampak konflik, orang-orang yang tinggal di kamp untuk IDP, komunitas lokal yang menampung IDPs, dan para pengungsi yang kembali sebelumnya. Amerika Serikat mendukung pembangunan demokratis di Sudan, serta transisi dari bantuan darurat ke bantuan pembangunan di mana kondisi dan keamanan memungkinkan.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Sudan Selatan telah melakukan referendum di tahun 2011, akan tetapi sebagai negara yang baru merdeka, Sudan Selatan masih harus mempersiapkan diri untuk menghadapi rintangan. Oleh karena itu Sudan Selatan mencoba mengurangi kekurangan dengan cara menjalin relasi dengan negara-negara lain. Sudan Selatan memanfaatkan faktor historisnya dengan beberapa negara agar dapat menjalin kerjasama, di sisi lain Sudan Selatan juga memanfaatkan lahan minyak bumi sebagai bahan kerjasama. Meskipun tidak memiliki peralatan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk mengolah lahan minyak tersebut, Sudan Selatan meminta Tiongkok menjadi mitra bisnis sehingga dapat dijadikan sumber utama dari penghasilan negara.

Selain menjalin relasi dengan Tiongkok, Sudan Selatan juga menjalin relasi dengan Amerika Serikat, Mesir, dan Uganda. Sudan Selatan memilih memulai kerjasama dengan keempat negara ini dengan alasan faktor historis dan keempat negara inilah yang memberikan bantuan

dalam proses disintegrasi Sudan Selatan. Atas dasar itulah Sudan Selatan memberikan prioritas dalam kerjasama dengan keempat negara tersebut.

Peneliti menyimpulkan bahwa Sudan Selatan memiliki kepentingan kerjasama, tiga faktor utama kepentingan Sudan Selatan yaitu faktor ekonomi, faktor keamanan, dan juga faktor politik. Dari faktor keamanan Sudan Selatan membutuhkan kekuatan dan kemampuan untuk menjaga keamanan dan kedaulatannya dengan cara membentuk aliansi militer dengan Tiongkok dan Amerika Serikat. Pada faktor ekonomi Sudan Selatan memanfaatkan sumber daya minyak. Sedangkan dari faktor politik, Sudan Selatan menjalin kerjasama dengan keempat negara tersebut dengan harapan untuk menjaga kestabilan dan juga kedaulatan negara.

Daftar Pustaka

Buku

Bakry Suryadi (2016) *Metode Penelitian Hubungan Internasional: Pustaka Pelajar*.

Jok Kuel, 2012, *Conflict of National Identity in Sudan*, University of Helsinki, Department of World Cultures

Laverle Berry, 2015, *Sudan: a Country Study*, Library of Congress

Matthew Arnold dan Matthew LeRiche, 2012, *South Sudan: From Revolution to Independence*, Oxford University Press, inc

Musso Giorgio, 2011, *From One Sudan to Two Sudan: From War to Peace?*.

Mpisy Kenneth, 2010, *The Cost of Future Conflict in Sudan*, The Institute for Security Studies

Ottaway Marina dan El-sadany, 2012, *Sudan: From Conflict to Conflict*

Prof.Dr. Lexy J. Moleong.(2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya Offset.

Reeve Richard, 2012, *Peace and Conflict Assesment of South Sudan 2012*, International Alert

Shulika Lukong dan Okeke-Uzodike, 2016, *Inter-Ethnic Conflict in South Sudan: A Challenge to Peace*, University of KwaZulu-Natal,

Yves-Chantal Gagnon. (2010) *The Case Study as Research Method: A Practical Handbook*. Canada: Presses de l'Universite du Quebec.

Jurnal

Ashok Swain, 2014, *Ethiopia, the Sudan, and Egypt: The Nile River Dispute*, Cambridge University Press

Astrid Ezhara Sinaga, 2013, *Keberadaan China Dalam Penyelesaian Konflik Sudan-Sudan Selatan*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UnMul

Aziza Geleta Dessalegn, 2017, *The Cause and Consequence of Conflict in South Sudan*, Institute of Peace and Security Studies Addis Ababa

- Azizah Rezita Nailul, 2014, *Keterlibatan Amerika Serikat Dalam Penyelesaian Konflik di Sudan*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- Blanchard Lauren, 2016, *Conflict in South Sudan and the Challenge Ahead*, Congressional Secret Service
- Darfur's Conflict <https://www.globalsecurity.org/military/world/para/darfur.htm> terakhir di akses pada 27 Juli 2018
- David Chandra, 2016, *Sudan Selatan Pasca Merdeka*
- Donald E. Nuechterlein, 1976, *National Interest and Foreign Policy: A Conceptual Framework For Analysis and Decision-making*, British Journal of International Studies.
- Ebaldalla Mahjoub, 2016, *Trade Between Egypt, Sudan and Ethiopia: Prospect and Challenges for Trilateral Trade Integration*
- Eric Hiarief, 2003, *Teori Negara Marxis*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM
- Fajar Ajie Setiawan, *Memahami Investasi Berbasis Minyak China di Sudan: Analisis Interaksi Strategis China Pada Situasi Konflik*, Fakultas Ilmu Sosial dan Komunikasi Universitas Wanita Internasional
- Knopf Kate, 2016, *Ending South Sudan's Civil War*, Council Special Report no.77
- Kuntzelman Christa, 2013, *South Sudan: Solutions for Moving Beyond an "Ethnic Conflict"*, Depaul University, Volume 3 Number 1
- Lauren Ploch Blanchard, 2013, *The Crisis In South Sudan*, Congressional Research Service
- Manyok Philip, 2016, *Oil and Darfur's Blood: China's Thirst for Sudan's Oil*, Nova Southeastern University
- Muhammad Fajar Febrianto, 2019, *Kehadiran Amerika Serikat di Kasus Sudan Selatan Pada Tahun 2011-2015: Bantuan Kemanusiaan atau Kepentingan Strategis*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNDIP
- New Sudan's New War: Pelanggaran oleh Pemerintah dan Pasukan Oposisi*, Agustus 2014. ([https:// www. Hrw.org/report](https://www.Hrw.org/report)) Diakses pada 26 Juli 2018
- Nida Shofia, 2014, *Kebijakan Amerika Dalam Mendukung Kemerdekaan Sudan Tahun 2011*, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Obert Hodzi, 2017, *Strategy of 'Paralels': China in the South Sudanese Armed Conflict*, Centreasia.eu

Putri Cahyanti, 2017, *Analisis Konflik Sudan dan Sudan Selatan Pasca Referendum Pemisahan Diri Sudan Selatan dari Sudan*, Vol 3, No 4

Rosa Longi Folia, 2012, *Perubahan Kebijakan Luar Negeri Non-Intervensi China Terhadap Konflik Sudan*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNAIR

Southern Sudan Referendum Final Results Report

Syaiful Anam dan Ristiyani, *Kebijakan Belt and Road (BRI) Tiongkok Pada Masa Pemerintahan Xi Jinping*, Universitas Mataram NTB

Wilson Jacqueline, 2014, *Local Peace Processes in Sudan and South Sudan*

Report and Working Paper

Accord, 2015, *Conflict Trends: Issue 4*

Berouk Meslin, 2015, *East Africa Report: The Regionalisation of South Sudanese Crisis*, Institute for Security Studies (ISS)

Darfur Peace Agreement

IGAD, 17 Agustus 2015, *Agreement On the Resolution of the Conflict in the Republic of South Sudan*

Jacob Hoigilt, 2010, *The Sudan Referendum and Neighbouring Countries: Egypt and Uganda*, Research Gate

Southern Sudan Referendum Commission, 2011

The International Refugee Rights Initiative, 2018, *Dialogue and Peace Agreement in South Sudan*

The Political Economy of South Sudan, 2018, African Development Bank Group

UN, 2014, *Conflict in South Sudan: A Human Rights Report*, United Nations Mission in the Republic of South Sudan (UNMISS)

USAID Fact Sheet #5, 6 Maret 201, South Sudan Crisis, USAID

USAID Fact Sheet #12, 30 September 2018, South Sudan Crisis, USAID

Verjee Aly, 2018, *Sudanese Views of Relations With the United States*, United States Institute of Peace

Itrace, 2018, *Weapon Supplies Into South Sudan's Civil War*, Conflict Armament Research

Wilson Jacqueline, 2014, *Local Peace Processes in Sudan and South Sudan*, United States Institute of Peace

Young John, 2007, *Sudan's People Liberation Army Disarmament in Jonglei and Its Implications*, ISS Paper 137

Sumber Online

BBC 2012, https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2010/02/100220_darfur terakhir di akses pada 29 Juli 2018

<http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/321906/Egypt/Politics-/In-Photo-Sisi-stresses-Egypt-s-support-for-South-S.aspx> terakhir di akses pada 25 Juni 2019

<https://thediplomat.com/2019/02/how-china-came-to-dominate-south-sudans-oil/> terakhir di akses pada 30 Juni 2019

<https://www.accord.org.za/conflict-trends/south-sudan-uganda-relations/> terakhir di akses pada 15 Juli 2019

<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/od.html> terakhir di akses pada 2 Juli 2019

<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/su.html> terakhir di akses pada 2 Juli 2019

<https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/south-sudan/conflict-cooperation-sudan-south-sudan-and-uganda> terakhir di akses pada 28 Juni 2019

<https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/south-sudan/288-china-s-foreign-policy-experiment-south-sudan> terakhir di akses pada 2 Juli 2019

<https://www.egypttoday.com/Article/2/59650/Egypt-supports-reaching-peace-in-South-Sudan-Sisi> terakhir di akses pada 6 Juli 2019

<https://foreignpolicy.com/2018/10/04/quietly-angrily-washington-confronts-its-wayward-offspring-south-sudan-africa-diplomacy-foreign-aid-war-conflict-peace-deal-salva-kiir/> terakhir di akses pada 8 Juli 2019

<https://foreignpolicy.com/2018/11/29/how-eu-and-chinese-arms-diverted-to-south-sudan-fueled-its-civil-war-small-arms-warfare-east-africa-conflict-china-weapons-exports-humanitarian-crisis-juba-peace-deal-salva-kiir/> terakhir diakses pada 5 Juli 2019

http://images1.rri.co.id/post/berita/262952/luar_negeri/presiden_sudan_umumkan_penarikan_senjata_dari_warga_di_darfur.html terakhir diakses pada 6 Agustus 2018

<https://www.mfa.gov.eg/English/ForeignPolicy/EgyptandtheWorld/Africa/Pages/South-Sudan.aspx> terakhir di akses pada 20 Juni 2019

http://mochamad-arya-seta-fisip14.web.unair.ac.id/artikel_detail.html terakhir di akses pada 8 Agustus 2018

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zwjg_665342/zwbd_665378/t1525562.shtml terakhir di akses pada 27 Juni 2019

https://www.researchgate.net/publication/324168464_China_and_The_Conflict_in_South_Sudan_Security_and_Engagement terakhir di akses pada 11 Juli 2019

<https://www.reuters.com/article/us-uganda-sudan-bashir/uganda-says-it-is-willing-to-consider-asylum-for-sudans-ousted-leader-bashir-idUSKCN1RT0WA> terakhir di akses pada 27 Juni 2019

<https://www.state.gov/u-s-relations-with-south-sudan/> terakhir diakses pada 13 Juli 2019

<https://www.sudantribune.com/spip.php?article66155> terakhir di akses pada 8 Juli 2019

<https://www.voaindonesia.com/a/tentara-sudan-selatan-tembak-kendaraan-kedutaan-amerika/2521524.html> terakhir di akses tanggal 6 Agustus 2018

Maria, Krisis Sudan: Konflik Etnis Yang Diboncengi Kepentingan Asing
<https://kopiitudashat.wordpress.com> terakhir diakses pada: 24 Juli 2018

Sudan's Civil War, <https://www.globalsecurity.org/military/world/war/sudan-civil-war1.htm> terakhir di akses pada 19 Agustus 2018

Sudan's Conflict Timeline, http://crawfurd.dk/africa/sudan_timeline.htm terakhir akses pada 19 Agustus 2018

Sudan's Referendum <https://www.globalsecurity.org/military/world/war/sudan-peace-process.htm> terakhir di akses pada 19 Agustus 2018

Webster's New Encyclopedic Dictionary 1994, terakhir diakses pada 8 Agustus 2018